

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN APLIKASI
E-PLANNING DI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

IKHRISA DIANA KHUKMAWATI

NIM 155030100111041



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2019

MOTTO

Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah
(Lessing)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Efektivitas Pelaksanaan Aplikasi *E-Planning* di
Kementerian Perhubungan
Disusun oleh : Ikhrisa Diana Khukmawati
NIM : 155030100111041
Fakultas : Ilmu Administrasi
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi/Minat :-

Malang, 17 Juni 2019

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota

Dr. Dra. Siti Rochmah, M.Si
NIP. 19570313 198601 2 001

Dr. Farida Nurani, S.Sos., M.Si
NIP. 19700721 200501 2 001

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 27 Juni 2019

Pukul : 10.00 WIB

Skripsi atas nama : Ikhrisa Diana Khukmawati

Judul : Efektivitas Pelaksanaan Aplikasi *E-Planning* di
Kementerian Perhubungan

Dan dinyatakan **LULUS**

MAJELIS PENGUJI

Ketua Komisi Pembimbing


Dr. Dra. Siti Rochmah, M.Si
NIP. 19570313 198601 2 001

Anggota Komisi Pembimbing I


Dr. Farida Nurani, S.Sos., M.Si
NIP. 19700721 200501 2 001

Anggota Komisi Pembimbing II


Dr. Mardiyono, M.PA
NIP. 19520523 197903 1 001

Anggota Komisi Pembimbing III


Ali Maskur, S.AP., M.AP., MA
NIP. 19860716 201404 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah skripsi yang berjudul "**Efektivitas Pelaksanaan Aplikasi E-Planning di Kementerian Perhubungan**" tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, Juni 2019



Khrista Diana Khukmawati
NIM. 155030100111041

Ikhriana Diana Khukmawati, 2019. **Efektivitas Pelaksanaan Aplikasi *E-Planning* di Kementerian Perhubungan**. Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya, Malang. Dosen Pembimbing: Dr. Dra. Siti Rochmah, M.Si dan Dr. Farida Nurani, S.Sos., M.Si.

RINGKASAN

Perencanaan pembangunan terkait infrastruktur transportasi di Kementerian Perhubungan terdapat permasalahan yang ditemukan salah satunya yaitu transparansi dalam perencanaan pembangunan masih belum benar-benar transparan, sehingga beberapa unit kerja tidak dapat mengetahui atau mendapatkan informasi yang jelas dan akurat terkait dengan rumusan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Perhubungan membuat suatu aplikasi *e-planning* yang merupakan bagian dari *e-government* yang mana aplikasi *e-planning* ini diciptakan untuk mempermudah kinerja pegawai Kementerian Perhubungan dalam merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan direalisasikan di tahun berikutnya. Selain itu aplikasi ini juga diharapkan mampu menghasilkan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) yang berkualitas guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Maka dari itu aplikasi *e-planning* perlu dilihat proses tahapan pada pelaksanaannya agar dapat mengetahui keefektifitasan pelaksanaan aplikasi tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, hal itu bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan aplikasi *e-planning* yang dilakukan Kementerian Perhubungan yang dalam prosesnya terdiri dari ketepatan sasaran pelaksanaan, sosialisasi pelaksanaan, tujuan pelaksanaan, pemantauan pelaksanaan serta faktor pendukung dan penghambat untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan aplikasi *e-planning* pada Kementerian Perhubungan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian terdiri dari peneliti sendiri, pedoman wawancara, dan perangkat penunjang penelitian yang digunakan pada saat peneliti melakukan observasi di lapangan. Dalam menganalisis data penelitian, peneliti mengacu pada metode yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan aplikasi *e-planning* di Kementerian Perhubungan belum efektif dimana dapat dilihat pada upaya yang seharusnya dilakukan untuk mencapai tujuan dari dilaksanakannya aplikasi *e-planning* belum dilakukan secara maksimal yaitu merubah kebiasaan lama yang awalnya menyimpan file-file di dokumen dalam bentuk fisik (*paper*) ke penyimpanan dalam bentuk aplikasi *online*, sehingga berpengaruh pada pelaksanaan aplikasi *e-planning* di Kementerian Perhubungan. Oleh karenanya, peneliti memberikan saran kepada pihak Kementerian Perhubungan salah satunya yaitu agar mengadakan sosialisasi yang diadakan secara rutin terkait *e-planning* agar pegawai yang belum memiliki respon positif terhadap *e-planning* menjadi terbiasa akan adanya aplikasi tersebut. Hal ini dikarenakan di era sekarang sangat diharuskan untuk menggunakan aplikasi *online* seperti ini untuk memudahkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan setiap individu.

Kata Kunci: E-Planning, Efektivitas, Pelaksanaan Aplikasi.

repository.ub.ac.id

Ikhrisa Diana Khukmawati, 2019. **Effectiveness of E-Planning Application Implementation in Ministry of Transportation.** Program of Public Administrative. Faculty of Administrative Science. University of Brawijaya, Malang. Advisors: Dr. Dra. Siti Rochmah, M.Si and Dr. Farida Nurani, S.Sos., M.Si.

SUMMARY

There are problems found in planning about development related to infrastructure of transportation in Ministry of Transportation, one of them in the transparency of development planning, thus several working units do not get a clear and accurate information regarding to the formulation of development planning. Therefore, the Information and Communication Technology Center of Ministry of Transportation made an e-planning application that is part of e-government where this application was created to facilitate the performance of the officer of Ministry of Transportation in planning activities that will be realized in the following year. In addition, this application is also expected to be able to produce quality Work Plans and Budgets in order to achieve predetermined goals. Thus, according to that e-planning application should to be studied about its implementation process in order to know the effectiveness of the application.

This study was descriptive research with qualitative approach, that aimed to describe the implementation of e-planning application that was conducted by Ministry of Transportation, while its process consisted of the accuracy of implementation target, socialization of implementation, the purpose of implementation, supervision of implementation and supporting and inhibiting factors to understand about implementation process of e-planning application on Ministry of Transportation. Data source used were primary and secondary data. Data collection technique was conducted through observation, interview, and documentation. Research instruments consisted of researcher, interview guideline, and supporting device that used during observation. Data analysis referred to methodology that explained by Miles, Huberman, and Saldana.

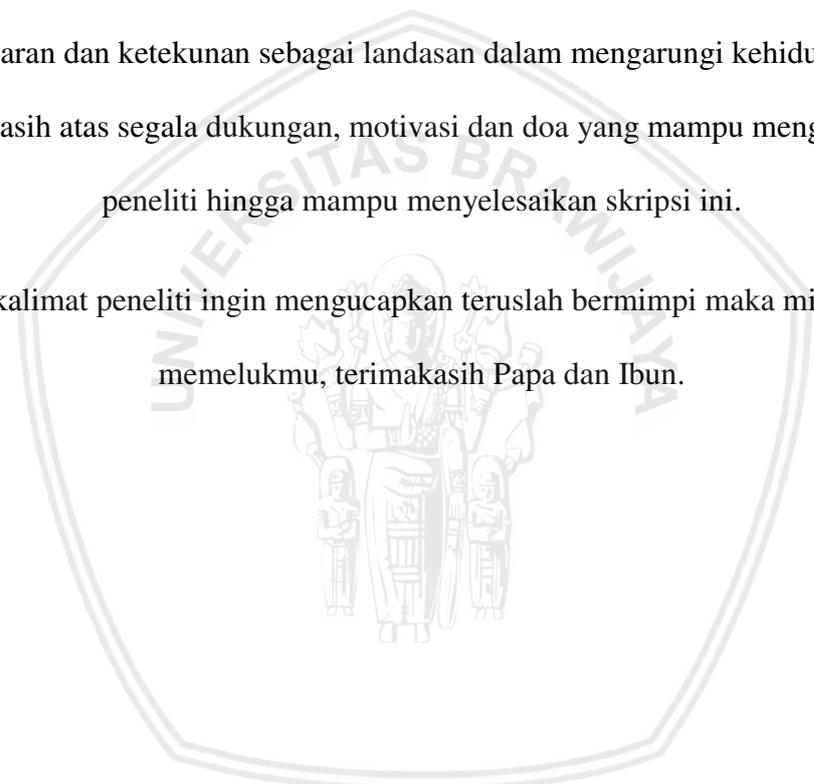
Based on the result of study, the implementation of e-planning application in the Ministry of Transportation was not effective yet, which can be seen in the efforts that should be made to achieve the goal of implementing e-planning application that have not been carried out maximally, namely changing old habits that initially store files in documents in the form of online application, so that the effect on the implementation of e-planning application at the Ministry of Transportation. Therefore, researcher would like to suggest the party of Ministry of Transportation to socialize routinely regarding to e-planning, thus the officer which had negative response about that application could be used to that application. This was due to in this era, the used of online application was a must to facilitate the activities that conducted by individual.

Keywords: E-Planning, Effectiveness, Implementation of Application.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga kepada keluarga kecil peneliti. Kupersembahkan ini kepada Alm. Papa yang selalu mengajarkan arti dari memaknai hidup ini dan Ibum yang selalu mengajarkan kesabaran dan ketekunan sebagai landasan dalam mengarungi kehidupan ini, terima kasih atas segala dukungan, motivasi dan doa yang mampu menghantarkan peneliti hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kalimat peneliti ingin mengucapkan teruslah bermimpi maka mimpi akan memelukmu, terimakasih Papa dan Ibum.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan berkah atas segala karunia yang diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan laporan skripsi berjudul **“Efektivitas Pelaksanaan Aplikasi E-Planning di Kementerian Perhubungan”**. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir kelak.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam menempuh ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, peneliti ingin menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA., Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Brawijaya Malang.
3. Bapak Dr. Fadillah Amin, M.AP., Ph.D selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
4. Ibu Dr. Dra. Siti Rochmah, M.Si selaku Ketua Komisi Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan pengarahan, motivasi serta doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.



5. Ibu Dr. Farida Nurani, S.Sos, M.Si selaku Anggota Komisi Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan pengarahan, motivasi serta doa dalam proses penyusunan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Dr. Mardiyono, M.PA dan Bapak Ali Maskur, S.AP., M.AP., MA selaku Dosen Penguji yang telah memberi masukan terhadap skripsi ini.
7. Orang tua tercinta, Alm. Bapak Maslikhan dan Ibu Amin Nurdiana yang selalu memberikan motivasi, serta dukungan secara moril maupun materi, serta selalu memanjatkan doa yang tiada henti kepada kepada anak satu-satunya.
8. Sepupu peneliti yaitu Aan Nailufar dan Vidia Soviana yang telah membantu peneliti selama di Kota Malang, serta membantu peneliti secara moril maupun materi dalam menyelesaikan proses perkuliahan.
9. Seluruh anggota Biro Perencanaan, Ditjen Hubud, Ditjen Hubla, Ditjen Hubdat Kementerian Perhubungan yang telah memberikan izin penelitian di tempat serta lokasi yang menjadi fokus peneliti.
10. Terima kasih kepada Magurls: Apsari Dwita Pramesi, Cindi Clara Chesar, Dian Krishna Sitaresmi, Fadilla Ratna Sari, Lutvi Ismi Hidayah, Nabilah Ruli Yanti, Prisma Difta Cantika Sari yang telah memberi masukan serta dukungan yang tiada henti dalam proses penyusunan skripsi peneliti.
11. Kepada teman-teman: Ayu Indriadika, Putri Rizki, Adhe Rizal Budi Nugroho, Bayu Wahyudiansyah, Dicky Fatony, Nizam Sayuti Rachmat, yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Terima kasih teman susah senang Nabilah Ruli Yanti dan Prisma Difta Cantika Sari yang selalu memberi dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi oleh peneliti.
13. Terima kasih untuk Achmad Chandra Wicaksana yang yang selalu memberi dukungan kepada peneliti.
14. Teman-teman Jurusan Administrasi Publik 2015 yang selalu memberikan inspirasi bagi peneliti.
15. Serta semua pihak terkait yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT akan membalas budi baik semua pihak yang telah membantu pelaksanaan sampai dengan penyusunan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti telah berusaha memberikan hasil yang terbaik. Karena itu peneliti juga mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Peneliti memohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan dihati, itu semata-mata datang dari peneliti dan jika ada yang bermanfaat itu semata-mata dari Allah SWT. Akhir dari kata peneliti mengucapkan terimakasih dan mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Malang, 17 Juni 2019

Peneliti

DAFTAR ISI

MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Administrasi Pembangunan	11
1. Definisi Administrasi Pembangunan.....	10
2. Karakteristik Administrasi Pembangunan.....	13
B. Efektivitas Program	16
1. Definisi Efektivitas Program.....	16
2. Faktor-Faktor Efektivitas Program.....	18
3. Indikator Efektivitas Program	21
C. Pelaksanaan Kebijakan	24
1. Definisi Pelaksanaan Kebijakan.....	24
2. Faktor-Faktor Pelaksanaan Kebijakan	25
D. <i>Electronic Government (E-Government)</i>	27
1. Definisi <i>Electronic Government (E-Government)</i>	27
2. Tahapan Perkembangan <i>Electronic Government (E-Government)</i>	30
3. Manfaat <i>Electronic Government (E-Government)</i>	31
4. Prinsip-Prinsip <i>Electronic Government (E-Government)</i>	33
5. Tantangan <i>Electronic Government (E-Government)</i>	35



E.	Sistem Informasi Manajemen (SIM)	38
1.	Definisi Sistem Informasi.....	38
2.	Ruang Lingkup Sistem Informasi Manajemen (SIM)	39
F.	<i>E-Planning</i> di Kementerian Perhubungan	43
BAB III METODE PENELITIAN		46
A.	Jenis Penelitian.....	46
B.	Fokus Penelitian.....	47
C.	Lokasi Penelitian.....	49
D.	Sumber dan Jenis Data.....	49
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	51
F.	Instrumen Penelitian	54
G.	Metode Analisis Data.....	55
H.	Teknik Keabsahan Data	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		60
A.	Gambaran Umum terkait Penelitian.....	60
1.	Sejarah Singkat Kementerian Perhubungan	60
2.	Lokasi Kementerian Perhubungan	62
3.	Visi dan Misi Kementerian Perhubungan	63
4.	Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Perhubungan	67
5.	Struktur Organisasi Kementerian Perhubungan.....	68
6.	Gambaran Umum Aplikasi <i>E-Planning</i>	74
7.	Alur Proses Kerja atau Standar Operasional Prosedur (SOP) Aplikasi <i>E-Planning</i>	85
B.	Penyajian Data Fokus Penelitian	87
1.	Efektivitas Pelaksanaan Aplikasi <i>E-Planning</i> di Kementerian Perhubungan.....	87
a.	Ketepatan Sasaran Pelaksanaan Aplikasi <i>E-Planning</i>	88
b.	Sosialisasi Pelaksanaan Aplikasi <i>E-Planning</i>	89
c.	Tujuan Pelaksanaan Aplikasi <i>E-Planning</i>	90
d.	Pemantauan Pelaksanaan Aplikasi <i>E-Planning</i>	93
2.	Faktor yang Mendukung dan Menghambat Pelaksanaan Aplikasi <i>E- Planning</i> di Kementerian Perhubungan	94
a.	Faktor Pendukung.....	94
1)	Antusiasme Pegawai dalam Menerima Aplikasi <i>E-Planning</i> di Kementerian Perhubungan.....	95
2)	Dukungan dari Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Perhubungan.....	96
b.	Faktor Penghambat.....	96

1) Rincian Usulan Kegiatan dari Satuan Kerja Kurang Jelas	97
2) Aplikasi Tidak Dapat Melakukan Rekapitulasi Data dengan Baik.....	98
C. Analisis Data dan Pembahasan	99
1. Efektivitas Pelaksanaan Aplikasi <i>E-Planning</i> di Kementerian Perhubungan.....	100
a. Ketepatan Sasaran Pelaksanaan Aplikasi <i>E-Planning</i>	101
b. Sosialisasi Pelaksanaan Aplikasi <i>E-Planning</i>	102
c. Tujuan Pelaksanaan Aplikasi <i>E-Planning</i>	103
d. Pemantauan Pelaksanaan Aplikasi <i>E-Planning</i>	105
2. Faktor yang Mendukung dan Menghambat Pelaksanaan Aplikasi <i>E- Planning</i> di Kementerian Perhubungan	107
a. Faktor Pendukung.....	107
1) Antusiasme Pegawai dalam Menerima Aplikasi <i>E-Planning</i> di Kementerian Perhubungan.....	107
2) Dukungan dari Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Perhubungan.....	108
b. Faktor Penghambat	108
1) Rincian Usulan Kegiatan dari Satuan Kerja Kurang Jelas	108
2) Aplikasi Tidak Dapat Melakukan Rekapitulasi Data dengan Baik.....	109
BAB V PENUTUP.....	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA.....	115
LAMPIRAN.....	119

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Konsep Pokok Sistem Informasi Manajemen (SIM)	41
Tabel 2. Daftar Informan Wawancara.....	53



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Faktor Pengaruh Efektivitas	19
Gambar 2. Analisis Data Model Interaktif Miles, Huberman dan Saldana	58
Gambar 3. Gedung Kementerian Perhubungan	62
Gambar 4. Struktur Organisasi Kementerian Perhubungan.....	72
Gambar 5. Struktur Organisasi Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan.....	73
Gambar 6. Halaman Login Aplikasi <i>E-Planning</i>	76
Gambar 7. Halaman Utama Aplikasi <i>E-Planning</i>	77
Gambar 8. Tabel Data Usulan Kegiatan Anggaran.....	79
Gambar 9. Tambah Data	80
Gambar 10. Daftar Usulan Tertunda.....	80
Gambar 11. Tabel Data Usulan.....	81
Gambar 12. Tambah Data Usulan.....	82
Gambar 13. Tabel Data Usulan.....	83
Gambar 14. Tabel Data Persyaratan.....	84
Gambar 15. Tambah Data	84
Gambar 16. Skema Prosedur Pelaksanaan Aplikasi <i>E-Planning</i>	86

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara	119
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian.....	121
Lampiran 3. Surat Pengantar Selesai Penelitian	122
Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian.....	123
Lampiran 5. Curriculum Vitae	127



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional dalam era globalisasi dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut di segala sektor kehidupan dalam rangka memacu peningkatan kemampuan nasional dan mengembangkan penyelenggaraan Negara yang maju serta demokratis berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Kansil dan Christine, 2002:37). Adanya suatu perencanaan dibutuhkan dalam proses pembangunan nasional tersebut. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 UU Nomor 25 Tahun 2004, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Tahapan-tahapan yang dibutuhkan dalam rangka mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang ideal meliputi penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana

dan evaluasi pelaksanaan rencana (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional). Hal itu berarti frasa perencanaan dan pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, ibarat satu tubuh yang berada di antara satu organ dengan organ lainnya memiliki keterhubungan yang melekat, karena pembangunan membutuhkan perencanaan dan perencanaan harus diwujudkan dalam pembangunan.

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan pembangunan, baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental dan spiritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik. (Riyadi dan Bratakusumah, 2005:7). Perencanaan pembangunan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional). Hal tersebut akan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pembangunan termasuk pembangunan infrastruktur transportasi.

Perencanaan pembangunan infrastruktur transportasi disiapkan melalui Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran oleh Kementerian Perhubungan. Berawal dari terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan, pihak Kementerian Perhubungan

berupaya untuk tertib administrasi dan tepat waktu dalam hal penyusunan anggaran guna pembangunan infrastruktur transportasi. Namun dalam pelaksanaannya seringkali menemui beberapa permasalahan akan tata cara penyusunan perencanaan dimaksud. Permasalahan yang dihadapi oleh Kementerian Perhubungan dalam proses penyusunan rencana kerja dan anggaran berdasarkan hal tersebut diantaranya adalah :

1. Usulan-usulan perencanaan pembangunan terkait transportasi masih belum terintegrasi karena usulan dilakukan melalui perwakilan unit kerja tingkat bawah dalam bentuk tertulis
2. Masih belum optimalnya dalam memanfaatkan kemajuan teknologi dalam penyusunan perencanaan pembangunan mengingat penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan membutuhkan waktu dan proses yang cukup panjang
3. Transparansi dalam perencanaan pembangunan masih belum benar-benar transparan, sehingga beberapa unit kerja tidak dapat mengetahui atau mendapatkan informasi yang jelas dan akurat terkait dengan rumusan perencanaan pembangunan

Berdasarkan permasalahan yang dimaksud tersebut membuat pihak Kementerian Perhubungan melakukan inovasi di dalam penyelenggaraan kegiatan proses penyusunan rencana kerja dan anggaran yaitu pelaksanaan konsep pemerintahan berbasis teknologi informasi atau biasa disebut *electronic government* yang disingkat menjadi *e-government* (Indrajit, 2002:36). *E-government* secara keseluruhan akan dapat meningkatkan

transparansi, kontrol dan akuntabilitas para penyelenggara pemerintahan serta menciptakan lingkungan tata pemerintahan baru yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sebagai akibat dari kecenderungan perubahan global (Kumorotomo, 2008:2). Pendanaan yang cukup besar juga diperlukan dalam penerapan *e-government* sehingga diperlukan kesiapan dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan aparat pemerintahan. Ketidaksiapan SDM, budaya organisasi, sarana dan prasarana teknologi informasi (infrastruktur), serta kurangnya perhatian dari pihak-pihak yang terlibat langsung dapat menjadi penyebab kegagalan dalam melaksanakan *e-government* (Bastian, 2003:1).

Bentuk dari penggunaan *e-government* yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan adalah aplikasi *e-planning* yang pertama kali diresmikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 1 Februari 2018 dalam acara Rapat Koordinasi Penyusunan Pagu Kebutuhan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan Tahun 2019. Aplikasi *e-planning* dimaksud merupakan sistem pendukung perencanaan atau *Planning Support System* yang berbasis komputer dan diakses secara *online* guna mendukung dan membantu proses penyusunan rencana kerja dan anggaran di lingkungan Kementerian Perhubungan. Menurut Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi, penggunaan aplikasi *e-planning* tersebut merupakan bagian dari proses perencanaan, kegiatan penyusunan rencana kerja dan anggaran yang memudahkan kinerja para pegawai dalam kegiatan

perencanaan dan pengalokasian anggaran agar berjalan lebih baik (kumparan.com, 1 Februari 2018).

Kehadiran aplikasi *e-planning* ini diharapkan mampu meningkatkan koordinasi dan pemahaman yang sama antar pegawai dalam pelaksanaannya serta mampu menghasilkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang berkualitas karena digunakan sebagai acuan bagi seluruh unit kerja Kementerian Perhubungan dalam menjalankan program dan kegiatan selama satu tahun ke depan agar tujuan dan sasaran unit kerja Kementerian Perhubungan akan sesuai dengan yang direncanakan. Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi yang ditemui di Kantor Kementerian Perhubungan pada acara Rapat Koordinasi Penyusunan Pagu Kebutuhan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan Tahun 2019 menginginkan alokasi anggaran yang lebih baik. Menurut beliau, kementerian yang dipimpinnya harus mulai mengubah cara berfikir dan mengikuti era *disruption* karena era ini tidak dapat dihindari (kumparan.com, 1 Februari 2018).

Pihak Kementerian Perhubungan sudah mulai menggunakan aplikasi *e-planning* sejak diresmikannya aplikasi tersebut yang saat ini sudah berjalan hingga kurang lebih 1 (satu) tahun. Pelaksanaan aplikasi *e-planning* dalam kegiatan penyusunan rencana kerja dan anggaran di Kementerian Perhubungan dibutuhkan komitmen bersama dalam mengembangkan konsep *e-planning* tersebut, untuk kedepannya juga dibutuhkan dorongan partisipasi dari seluruh unit kerja demi terwujudnya sistem pemerintahan yang

transparan, partisipatif, responsif, efisien dan akuntabel. Tentunya akan menarik untuk diteliti baik mengenai efektivitas pelaksanaan maupun faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Untuk dapat mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan aplikasi *e-planning* di Kementerian Perhubungan lebih lanjut peneliti akan melakukan sebuah penelitian yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul **“Efektivitas Pelaksanaan Aplikasi *E-planning* di Kementerian Perhubungan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan aplikasi *e-planning* di Kementerian Perhubungan?
2. Apa sajakah faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan aplikasi *e-planning* di Kementerian Perhubungan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan aplikasi *e-planning* di Kementerian Perhubungan.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan aplikasi *e-planning* di Kementerian Perhubungan.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat diterima oleh semua pihak terkait dengan tulisan ini. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan atau sumbangan informasi bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan aplikasi *e-planning* di Kementerian Perhubungan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahasan masukan mengenai efektivitas pelaksanaan aplikasi *e-planning* bagi Kementerian Perhubungan serta menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti dan pembaca mengenai efektivitas pelaksanaan aplikasi *e-planning* di Kementerian Perhubungan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang isi penulisan maka peneliti akan menyampaikan pokok-pokok bahasan yang terdapat pada setiap bab sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan. Adapun latar belakang mengemukakan terkait penelitian yang diteliti yaitu tentang efektivitas pelaksanaan aplikasi *e-planning* di Kementerian Perhubungan, rumusan masalah yakni pertanyaan terkait permasalahan yang terjadi di lapangan untuk dijadikan acuan dalam menjawab penelitian, tujuan penelitian yakni tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian, manfaat penelitian yaitu manfaat penelitian baik manfaat secara akademis maupun secara praktis, dan yang terakhir ialah sistematika penulisan yang memuat tentang runtutan bab dalam penelitian penulisan ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi teori yang digunakan yang bersumber dari buku, hasil penelitian (jurnal, skripsi, disertasi) dan peraturan perundang-undangan yang terkait masalah penelitian. Peneliti menggunakan teori-teori antara lain teori administrasi pembangunan, teori efektivitas organisasi, teori pelaksanaan kebijakan, teori *electronic government (e-government)*, dan teori Sistem Informasi Manajemen (SIM).

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, metode analisis data serta teknik keabsahan data. Jenis penelitian menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan analisis data interaktif oleh Miles, Huberman dan Saldana. Lokasi penelitian dilakukan di Kementerian Perhubungan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari satuan kerja Kementerian Perhubungan.

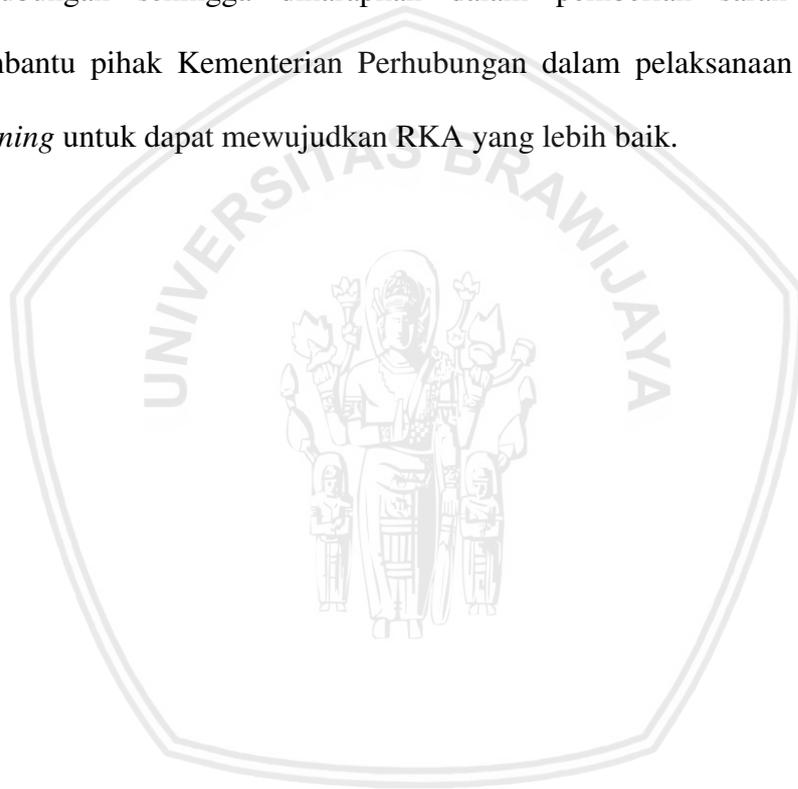
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum terkait penelitian, penyajian data fokus penelitian, serta analisis data dan pembahasan. Gambaran umum terkait penelitian yang merupakan gambaran pada lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti yaitu Kementerian Perhubungan sebagai objek dari pelaksanaan aplikasi *e-planning*. Pada penyajian data fokus penelitian, peneliti meramu hasil dari data-data yang diperoleh di lokasi penelitian. Pada analisis data dan pembahasan, data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisis dan disandingkan dengan teori indikator efektivitas organisasi itu sendiri untuk dapat menjawab fokus penelitian yang diserap dari rumusan masalah sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terkait pelaksanaan aplikasi *e-planning* di

Kementerian Perhubungan. Peneliti memaparkan hasil kesimpulan dari setiap rangkaian proses yang peneliti temukan di Kementerian Perhubungan terkait bagaimana pelaksanaan aplikasi *e-planning* dilakukan. Peneliti juga menambahkan saran yang dapat diberikan dalam permasalahan penelitian mengenai efektivitas pelaksanaan aplikasi *e-planning* di Kementerian Perhubungan sehingga diharapkan dalam pemberian saran ini dapat membantu pihak Kementerian Perhubungan dalam pelaksanaan aplikasi *e-planning* untuk dapat mewujudkan RKA yang lebih baik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Pembangunan

1. Definisi Administrasi Pembangunan

Secara konseptual, ilmu administrasi merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan melalui usaha kelompok. Menurut Sondang P. Siagian yang dikutip oleh Anggara dan Sumantri (2016:24), administrasi pembangunan mencakup dua pengertian, yaitu administrasi dan pembangunan. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu bangsa dan negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*).

Menurut Mustopadidjaja yang dikutip oleh Anggara dan Sumantri (2016:24), administrasi pembangunan adalah “ilmu dan seni” tentang pembangunan suatu sistem administrasi negara dilakukan sehingga sistem administrasi tersebut mampu menyelenggarakan berbagai fungsi umum pemerintahan dan pembangunan secara efisien dan efektif. Menurut

Edward W. Weidner yang dikutip oleh Anggara dan Sumantri (2016:24)

lebih spesifik merumuskan administrasi pembangunan sebagai berikut:

“Development administration is defined as administrative development and the administration of development programmes. For the administration of the development, it is necessary that the administrative machinery itself should be improved and developed to enable a well coordinated and multi functional approach towards solving national problem on development.”

Pernyataan itu berarti menggambarkan administrasi pembangunan sebagai suatu pengembangan yang administratif dan administrasi dalam program pengembangan. Menurut J.B. Kristadi yang dikutip oleh Anggara dan Sumantri (2016:24), administrasi pembangunan adalah administrasi negara yang mampu mendorong ke arah proses perubahan, pembaharuan, dan penyesuaian serta pendukung suatu perencanaan.

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa administrasi pembangunan adalah seluruh proses yang akan dilakukan oleh administrator dalam upaya untuk mendorong dan untuk memberikan suatu pengawasan terhadap masyarakat ke arah modernisasi dan kebaikan yang multi-dimensional secara terpadu dan administratif. Selain itu, dapat disimpulkan juga bahwa administrasi pembangunan merupakan urusan atau kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok individu yakni pemerintah dalam hal penyediaan dan pelaksanaan peraturan atau kebijakan bagi seluruh atau sebagian masyarakat. Berkaitan antara administrasi pembangunan dengan pelaksanaan aplikasi *e-planning* adalah bahwasanya aplikasi *e-planning* menjadi suatu inovasi untuk pelaksanaan kegiatan perencanaan agar lebih

transparan dan akuntabel serta mempermudah dalam hal pengawasan perencanaan oleh Kementerian Perhubungan.

2. Karakteristik Administrasi Pembangunan

Menurut Irving Swerdlow dan Saul M. Katz yang dikutip oleh Anggara dan Sumantri (2016:25), karakteristik administrasi pembangunan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya suatu orientasi administrasi untuk mendukung pembangunan. Administrasi terhadap perubahan ke arah keadaan yang dianggap lebih baik. Keadaan yang lebih baik bagi negara-negara yang berkembang dinyatakan sebagai usaha ke arah modernisasi, pembangunan bangsa, dan pembangunan sosial ekonomi. Dalam administrasi pembangunan, diberikan uraian mengenai keterkaitan administrasi dengan aspek-aspek pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, dan lain-lain.
- b. Adanya peran administrator sebagai unsur pembangunan. Peranan serta fungsi pemerintah sangat erat kaitannya dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Administrator juga dapat menciptakan suatu sistem dan praktik administrasi yang membina partisipasi dalam pembangunan.
- c. Perkembangan, baik dalam ilmu maupun pelaksanaan perencanaan pembangunan memiliki orientasi yang semakin besar dalam memberikan perhatian terhadap aspek pelaksanaan rencana. Suatu

perencanaan yang berorientasi pada pelaksanaannya lebih banyak memperhatikan aspek administrasi dalam aspek pembangunannya.

- d. Administrasi pembangunan masih berdasarkan prinsip administrasi negara. Akan tetapi, administrasi pembangunan memiliki karakteristik yang lebih maju daripada administrasi negara.

Sondang P. Siagian yang dikutip oleh Anggara dan Sumantri (2016:26) merumuskan ciri-ciri administrasi pembangunan sebagai berikut:

- a. Lebih memberikan perhatian terhadap lingkungan masyarakat yang berbeda-beda, terutama lingkungan masyarakat di negara-negara yang berkembang.
- b. Mempunyai peran aktif dan berkepentingan terhadap tujuan pembangunan, baik dalam perumusan kebijaksanaan maupun dalam pelaksanaan yang efektif. Bahkan, administrasi ikut serta mempengaruhi tujuan-tujuan pembangunan masyarakat dan menunjang pencapaian tujuan sosial, ekonomi, dan lain-lain yang dirumuskan kebijaksanaannya dalam proses politik.
- c. Berorientasi pada usaha-usaha yang mendorong perubahan ke arah keadaan yang dianggap lebih baik untuk masyarakat pada masa depan atau berorientasi masa depan.
- d. Lebih berorientasi pada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan dari pemerintah. Administrasi pembangunan lebih bersikap sebagai *development agent*, yaitu merumuskan kebijaksanaan pembangunan

dan pelaksanaan yang efektif, serta sebagai kemampuan dan pengendalian instrumen-instrumen bagi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.

- e. Mengaitkan diri dengan substansi perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan tujuan-tujuan pembangunan di berbagai bidang yaitu ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain.
- f. Administrator dalam aparat pemerintah juga dapat menjadi penggerak perubahan
- g. Lebih berpendekatan lingkungan, berorientasi pada kegiatan, dan bersifat pemecahan masalah. Ketiga unsur ini disebut *mission driven*.

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa karakteristik administrasi pembangunan yaitu administrasi yang dalam pelaksanaannya menjalankan tugas-tugas dari pemerintah dengan merumuskan kebijaksanaan untuk menciptakan perubahan ke arah keadaan yang dianggap lebih baik. Berkaitan dengan pelaksanaan aplikasi *e-planning* yang memudahkan beban kerja pegawai Kementerian Perhubungan dalam merencanakan pembangunan infrastruktur transportasi yang diharapkan dapat mengalami perubahan ke arah yang lebih baik.

B. Efektivitas Program

1. Definisi Efektivitas Program

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa kata efektivitas berasal dari Bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti efektif, berhasil, tepat atau manjur. Efektivitas pada dasarnya berasal dari kata efek dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab-akibat (Pasolong, 2007:4). Seperti halnya pengertian yang telah dijelaskan oleh Pasolong, sebab-akibat disini didasarkan atas timbal balik dari pelaksanaan program atau kebijakan yang dilakukan sehingga memunculkan hasil dari pelaksanaan program atau kebijakan tersebut. Hasil itu nantinya yang akan menjadi penilaian terhadap berhasil atau tidaknya organisasi tersebut dalam mencapai sasaran atau tujuan yang ingin dicapai.

Suatu program dapat dikatakan berhasil diukur dari sejauh mana pelaksanaan program tersebut mampu untuk mencapai tujuan program yang telah ditetapkan (Melinda, 2003:31). Menurut Melinda, program dalam mencapai tujuannya memiliki perencanaan yang berorientasi ke depan, dimana perencanaan tersebut dirangkai sedemikian rupa guna mencapai hasil yang optimal dari pencapaian tujuannya. Pencapaian hasil tersebut seringkali dihubungkan dengan efektivitas, dimana efektivitas merupakan perbandingan atau hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang dicapai (Miller dalam Tangkilisan, 2005:138).

Oleh karena itu, efektivitas dapat dijadikan sebagai sebuah ukuran keberhasilan dari suatu organisasi dari program-program atau kebijakan

yang mereka laksanakan. Semakin tinggi nilai efektivitas dari suatu program maka tingkat keberhasilan dari program tersebut akan tinggi pula (Hidayat, 2006:27). Efektivitas sering dikaitkan dengan efisiensi, meskipun keduanya memiliki pemahaman yang berbeda. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Sedarmayanti (2009:59) seperti berikut:

“Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat”.

Terkait penjelasan tersebut dapat diketahui bahwasanya efektivitas dan efisiensi meskipun saling berdampingan dalam mengukur suatu pelaksanaan program atau kebijakan, namun keduanya memiliki pengertian yang berbeda dalam orientasi pengukurannya. Menurut Etzioni yang dikutip oleh Halim dan Iqbal (2012:30) dikemukakan sebagai berikut:

“Suatu organisasi dapat dibentuk agar menjadi unit sosial yang paling efektif dan efisiensi, dimana efektivitas program dapat diukur dari sejauh mana organisasi tersebut dapat mencapai tujuan, sedangkan efisiensi program dikaji dari segi sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan suatu unit pengeluaran (*output*). Selain itu efektivitas program dijabarkan berdasarkan keputusan organisasi untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya langka dan berharga dengan sepandai mungkin dalam usahanya mengejar tujuan operasi dan operasionalnya”.

Beberapa pendapat mengenai pengertian efektivitas tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa efektivitas program merupakan suatu ukuran yang digunakan sebagai penilaian atas pelaksanaan aplikasi *e-planning* di dalam suatu organisasi untuk mengetahui seberapa jauh

tingkat keberhasilan aplikasi tersebut dalam pelaksanaannya. Suatu pelaksanaan program atau kebijakan dapat dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

2. Faktor-Faktor Efektivitas Program

Seperti yang telah dijelaskan bahwa efektivitas sendiri merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program atau kebijakan yang telah dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut, tingkat efektivitas ditentukan oleh beberapa faktor yang ada di dalam organisasi itu sendiri yang mampu mempengaruhi tingkat efektivitas pelaksanaan program atau kebijakan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas menurut Hasibuan yang dikutip oleh Samsudin dkk (2014:75) sebagai berikut:

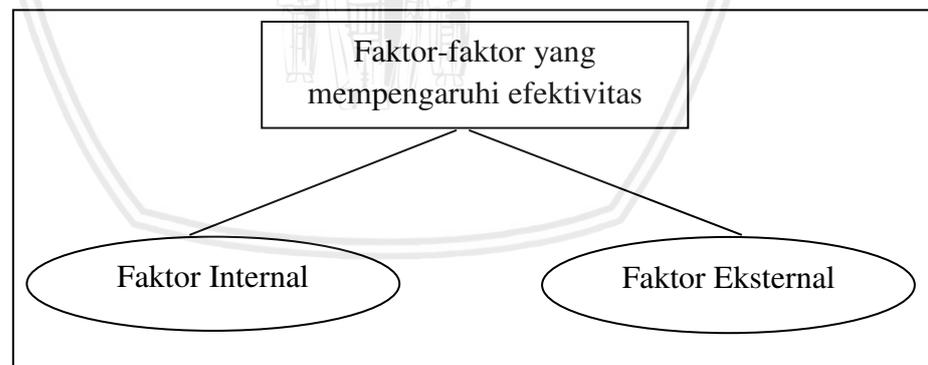
- a. Kualitas sumber daya manusia pada dasarnya adalah tingkat pengetahuan, kemampuan dan kemauan yang terdapat pada sumber daya manusia
- b. Kemampuan adalah kapasitas individu untuk melaksanakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu
- c. Sarana prasarana merupakan penunjang atau peralatan kerja. Sarana prasarana adalah bagian penting dan ikut menentukan terselenggaranya aktivitas. Faktor sarana dan prasarana diartikan sebagai peralatan penting dalam penyelenggaraan aktivitas

pemerintah, dalam hal ini sarana digunakan untuk mempermudah atau memperlancar gerak dan aktivitas pemerintah.

- d. Pengawasan adalah satu diantara fungsi manajemen yang merupakan proses kegiatan pemimpin untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan tugas dalam sebuah lembaga akan terlaksana dengan baik sesuai dengan kebijakan, intruksi, rencana dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Menurut Sutarto yang dikutip oleh Tangkilisan (2002:60) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas adalah faktor internal dan eksternal yang dapat digambarkan pada skema teori berikut.

Gambar 1. Faktor Pengaruh Efektivitas



Sumber: Sutarto dalam Tangkilisan (2002:60)

- a. Faktor internal ini meliputi berbagai keseluruhan faktor yang ada dan berkaitan dengan sekelompok orang yang melakukan aktivitas kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Adanya kerjasama merupakan unsur terpenting dalam suatu lembaga. Hubungan

kerjasama yang baik maka keberhasilan pencapaian tujuannya akan lebih cepat. Kerjasama ini bukan hanya terjadi antara individu dengan individu melainkan dapat juga dengan individu dengan instansi atau instansi dengan instansi. Faktor-faktor internal tersebut antara lain :

- 1) Departemenisasi, kegiatan menyusun satuan-satuan dalam suatu lembaga
 - 2) Fleksibilitas, keadaan dimana struktur organisasi mudah diubah untuk disesuaikan dengan tuntunan dan kebutuhan yang ada
 - 3) Rentangan kontrol
 - 4) Berkelangsungan, kondisi untuk memberikan dukungan dengan berbagai sumber daya yang dimiliki agar aktivitas dapat berjalan terus
 - 5) Kepemimpinan (*leader*), proses pemerintah yang mempengaruhi agar kegiatan yang saling terkait dapat diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya
 - 6) Keseimbangan, ditempatkan pada stuktur dan perannya masing-masing
- b. Faktor eksternal mencakup suatu jaringan hubungan-hubungan pertukaran dengan sejumlah lembaga dan melibatkan diri dengan tujuan untuk memperoleh dukungan, mengatasi hambatan, melakukan sumber daya, menata lingkungan yang kondusif dan proses transformasi nilai maupun inovasi maupun norma sosial yang ada.

Berdasarkan pendapat diatas dapat diketahui bahwa faktor internal yang terdiri dari indikator kepemimpinan (*leader*) berpengaruh terhadap efektivitas pada pelaksanaan aplikasi *e-planning* di Kementerian Perhubungan dalam proses perencanaannya.

3. Indikator Efektivitas Program

Indikator dari efektivitas organisasi digunakan untuk mengukur efektivitas dalam dimana suatu target atau sasaran dapat tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan baik bagi penilaian pelaksanaan suatu program atau kebijakan organisasi (Sedarmayanti, 2009:59). Efektivitas adalah kesesuaian antara *output* dengan tujuan yang ditetapkan (Subagyo dalam Budiani, 2007:52). Semakin besar *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan, maka tingkat efektivitas dan tingkat keberhasilan dari program atau kebijakan organisasi tersebut semakin tinggi pula (Mahmudi, 2005:92). *Output* yang dimaksud disini yaitu hasil dari pelaksanaan aplikasi *e-planning*. Target atau sasarannya adalah untuk meningkatkan kualitas RKA dan dapat dikatakan efektif apabila pelaksanaan ini hasilnya adalah mampu meningkatkan kualitas RKA yang ada sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan. Berikut merupakan indikator efektivitas program menurut Budiani (2007:53), yaitu:

- a. Ketepatan sasaran program, yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Menurut Makmur (2011:8) ketepatan sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih bersifat operasional, penentu sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun ditetapkan organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula, jika sasaran

yang ditetapkan itu kurang tepat maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

- b. Sosialisasi program, yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program tersampaikan kepada penerima informasi pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya
- c. Tujuan program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya
- d. Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program

Sedangkan indikator efektivitas yang dikemukakan oleh Stephen Robbin yang dikutip oleh Mohyi (2012:199), menyebutkan bahwa efektivitas dapat diukur melalui dua pendekatan yaitu sebagai berikut:

- a. Pendekatan pencapaian

Pencapaian tujuan dalam suatu organisasi berpengaruh dengan penilaian efektivitas organisasi tersebut. Pendekatan ini memandang organisasi sebagai suatu kesatuan yang dengan sengaja dibuat, rasional dan untuk mencapai tujuan, sehingga pencapaian tujuan yang berhasil menjadi suatu ukuran. Menurut pendekatan ini, suatu organisasi dikatakan efektif apabila tujuan-tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik

- b. Pendekatan sistem

Pendekatan ini menilai suatu organisasi yang dilihat dari kemampuannya untuk memperoleh masukan, memproses masukan tersebut, menyalurkan keluarannya, dan mempertahankan stabilitas serta keseimbangan hidupnya. Sehingga, tidak hanya melihat seberapa

jauh tujuan-tujuan yang dicapai oleh suatu organisasi tetapi melihat bagaimana organisasi itu mencapai tujuannya. Pendekatan ini tidak mengabaikan tujuan akhir, tapi hanya dipandang sebagai salah satu elemen di dalam kumpulan kriteria yang lebih kompleks. Pendekatan ini lebih menekankan pada kriteria yang akan meningkatkan pada kelangsungan hidup jangka panjang organisasi, seperti kemampuan organisasi untuk memperoleh sumber daya, mempertahankan dirinya secara internal sebagai sebuah organisasi. Menurut pendekatan ini, dikatakan efektif apabila dapat menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungannya.

Ukuran efektivitas melalui dua pendekatan tersebut dilihat dari seberapa jauh organisasi itu sendiri dalam mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Sasaran yang penting dan perlu diperhatikan dalam pengukuran efektivitas melalui pendekatan ini yaitu dengan langkah yang realistis dalam pencapaian sasaran organisasi dengan memperhatikan permasalahan dalam pelaksanaan program atau kebijakan yang dilakukan dalam pencapaian *output* yang telah ditargetkan. Berikut merupakan indikator atau ukuran efektivitas yang dikemukakan James L. Gibson dalam Kurniawan (2005:107), adalah sebagai berikut:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap
- d. Perencanaan yang matang
- e. Penyusunan program yang tepat
- f. Tersedianya sarana dan prasarana
- g. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

Merujuk dari beberapa indikator efektivitas yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas dalam pelaksanaan aplikasi *e-planning* dapat diukur melalui beberapa indikator yang dapat dilihat dari beberapa hal yang terdapat di dalam organisasi itu sendiri, bagaimana segala sesuatu yang berkaitan dengan organisasi tersebut mampu untuk menyokong pelaksanaan aplikasi *e-planning* tersebut yang telah ditetapkan agar terlaksana dengan baik dan memberikan *output* yang baik pula.

C. Pelaksanaan Kebijakan

1. Definisi Pelaksanaan Kebijakan

Pelaksanaan merupakan suatu proses kegiatan yang berkesinambungan. Adanya pelaksanaan melainkan untuk mewujudkan suatu target sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Menurut Tjokroamidjojo yang dikutip oleh Adisasmita (2011:24), pelaksanaan diartikan sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam mencapai tujuan yang dikehendaki melalui serangkaian proses yang telah direncanakan. Selanjutnya menurut Westra dkk yang dikutip oleh Adisasmita (2011:24) menyatakan bahwa pelaksanaan adalah aktivitas-aktivitas atau usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan atau alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana melaksanakannya, kapan

melaksanakannya, kapan waktu dimulainya dan bagaimana cara yang harus dilakukan.

Definisi di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan merupakan aspek operasional dan rencana atau penerapan berbagai program yang telah disusun sebelumnya, mulai dari penetapan sampai hasil akhir yang dicapai sebagai tujuan semula. Menurut Abdullah yang dikutip oleh Sumaryadi (2005:79) terdapat 3 (tiga) unsur utama dalam pelaksanaan yaitu adanya program yang dapat menjadi ukuran utama dalam melaksanakan kegiatan, target grup yaitu kelompok yang menjadi sasaran dari program yang akan dilaksanakan, serta unsur-unsur pelaksana yaitu pihak mana saja yang terlibat dalam pelaksanaan program yang dibuat. Dapat disimpulkan bahwa 3 (tiga) unsur utama tersebut berperan penting dalam proses pelaksanaan terutama pelaksanaan aplikasi *e-planning* di Kementerian Perhubungan, yang mana jika unsur-unsur tersebut tidak ada maka pelaksanaan tersebut tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

2. Faktor-Faktor Pelaksanaan Kebijakan

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan menempati posisi paling penting dalam menentukan keberhasilan suatu program untuk diwujudkan. Menurut Tjokroamidjojo yang dikutip oleh Adisasmita (2011:25) dalam proses kegiatannya maka perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

- a. Perlu ditentukan secara jelas siapa atau badan/lembaga mana yang secara fungsional akan disertai wewenang untuk mengkoordinasikan program di dalam suatu sektor
- b. Perlu diperhatikan penyusunan program pelaksanaan yang jelas dan baik. Dalam program pelaksanaan itu, dasar prinsip fungsional perlu dituangkan ke dalam rangkaian prosedur yang serasi, jelas dan ditaati oleh semua pihak yang terlibat dalam hubungan pelaksanaan program tersebut.
- c. Perlu dikembangkan hubungan kerja yang lebih baik antara lain dalam bentuk badan kerjasama atau suatu panitia kerjasama dengan tanggung jawab dan koordinasi yang jelas
- d. Perlu diusahakan koordinasi melalui proses penyusunan anggaran dan pelaksanaan pembiayaannya.

Selanjutnya menurut Menurut Edwards yang dikutip oleh Widodo (2011:96) faktor-faktor yang mempengaruhi berhasilnya suatu pelaksanaan adalah:

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.
- b. Sumber daya, dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup

guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.

- c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi pelaksana program.
- d. Struktur birokrasi, yaitu SOP (*Standard Operating Procedure*) yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan karena penyelesaian masalah-masalah akan memerlukan penanganan dan penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor di atas dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses pelaksanaan terutama pelaksanaan aplikasi *e-planning* di Kementerian Perhubungan, namun juga adanya keterikatan dan saling mempengaruhi antara faktor yang satu dengan faktor yang lain.

D. *Electronic Government (E-Government)*

1. Definisi *Electronic Government (E-Government)*

Salah satu tujuan dari reformasi pemerintahan adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* khususnya dalam pembangunan infrastruktur transportasi (Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 336 Tahun 2018 tentang Reviu Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019). Pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pemerintahan dan pembangunan merupakan salah satu faktor untuk mewujudkan *good*

governance (kompasiana.com, 6 November 2016). Menurut Effendi yang dikutip oleh Akadun (2009:130) menyatakan untuk membangun pemerintahan yang lebih mampu menyelenggarakan *good governance*, perlu dibangun jaringan kerjasama yang didasarkan atas hubungan partisipatif, transparan, dan responsif antar pilar-pilar *good governance*.

Menurut Indrajit (2002:36), *e-government* merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan kalangan yang berkepentingan, dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet) dengan tujuan memperbaiki kualitas pemerintahan. Indrajit (2002:1) mengungkapkan, *e-government* sering digambarkan atau dideskripsikan secara cukup beragam oleh masing-masing individu atau komunitas. Hal ini disebabkan karena berbagai hal:

- a. Walaupun sebagai sebuah konsep, *e-government* memiliki prinsip-prinsip dasar yang universal, namun karena setiap negara memiliki skenario implementasi atau penerapannya yang berbeda, maka definisi dari ruang lingkup *e-government* pun menjadi beraneka ragam
- b. Spektrum implementasi aplikasi *e-government* sangatlah lebar mengingat sedemikian banyaknya tugas dan tanggung jawab pemerintah sebuah negara yang berfungsi untuk mengatur masyarakatnya melalui berbagai jenis interaksi dan transaksi
- c. Pengertian dan penerapan *e-government* di sebuah negara tidak dapat dipisahkan dengan kondisi internal baik secara makro maupun mikro dari negara yang bersangkutan, sehingga pemahamannya teramat

sangat ditentukan oleh sejarah, budaya, pendidikan, pandangan politik, kondisi ekonomi, dari negara yang bersangkutan

- d. Visi, misi, strategi pembangunan sebuah negara yang sangat unik mengakibatkan terjadinya beragam pendekatan dan skenario dalam proses pengembangan bangsa sehingga berpengaruh terhadap penyusunan prioritas pengembangan bangsa

Menurut Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Telematika Provinsi Jawa Timur, mendefinisikan *e-government* sebagai berikut:

“Sistem pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet untuk memberikan akses data atau informasi elektronik pemerintah kepada pemerintah, pemerintah kepada kalangan bisnis, pemerintah kepada masyarakat sehingga dapat mengakses berbagai informasi secara elektronik”.

Berdasarkan beberapa penjelasan tentang *e-government*, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *e-government* merupakan proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi serta akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Sejalan dengan pengertian di atas, bahwa *e-planning* merupakan bagian dari *e-government* yang mana bertujuan sebagai suatu alat interaksi antar unit kerja atau satuan kerja Kementerian Perhubungan dalam hal perencanaan dengan memanfaatkan atau menggunakan teknologi informasi yang ada guna memperbaiki kualitas RKA (Rencana Kerja Anggaran) dan kinerja satuan kerja Kementerian Perhubungan agar transparan dan akuntabel.

2. Tahapan Perkembangan *Electronic Government (E-Government)*

Tahapan perkembangan *e-government* menurut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan, bahwa dalam perkembangan *e-government* terdapat enam strategi yang digunakan, salah satunya adalah dengan melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan terukur. Tahapan-tahapan tersebut dapat dilaksanakan melalui tingkatan sebagai berikut:

- a. Tingkat persiapan meliputi:
 - 1) Pembuatan situs informasi di setiap lembaga
 - 2) Penyiapan SDM (Sumber Daya Manusia)
 - 3) Penyiapan sarana akses yang mudah misalnya menyediakan sarana *Multipurpose Community Center, Wernet*, dll
 - 4) Sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik
- b. Tingkat pematangan yang meliputi:
 - 1) Pembuatan situs web informasi publik interaktif
 - 2) Pembuatan antar keterhubungan dengan lembaga lain
- c. Tingkat pemantapan yang meliputi:
 - 1) Pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain

d. Tingkat pemanfaatan yang meliputi:

- 1) Pembuatan aplikasi pemerintahan yang bersifat G2G (*Government to Government*), G2B (*Government to Business*), G2C (*Government to Citizen*) yang terintegrasi

Tahapan-tahapan yang berupa empat tingkatan tersebut merupakan salah satu strategi pemerintah dalam pengembangan aplikasi *e-planning* Kementerian Perhubungan. Pengembangan ini harus diimbangi dengan dukungan sistem manajemen, proses kerja, dan transaksi informasi antar unit kerja atau satuan kerja Kementerian Perhubungan.

3. Manfaat *Electronic Government (E-Government)*

Kehadiran *e-government* di lingkungan pemerintah sangat diharapkan guna mewujudkan pemerintahan yang baik yang dapat memberikan manfaat optimal bagi yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, Setiyadi (2003:10) menyebutkan beberapa manfaat yang diperoleh dengan adanya *e-government*, antara lain:

- a. Peningkatan hubungan antara pemerintah dengan kalangan yang berkepentingan. Diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik dengan adanya transparansi.
- b. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menemukan pilihannya.
- c. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Koordinasi antar lembaga pemerintahan dapat dilakukan tanpa harus bertemu

secara langsung. Misalnya, melalui *email* atau dapat dilakukan *video conference*.

Kemudian menurut Indrajit (2002:5), manfaat *e-government* bagi suatu negara adalah sebagai berikut:

- a. Memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan negara
- b. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dalam rangka penerapan konsep *good governance*
- c. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun *stakeholder*-nya untuk keperluan aktivitas sehari-hari
- d. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan
- e. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan tren yang ada
- f. Memberdayakan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis

Menurut Habibullah (2010:188) manfaat dan tujuan dari *e-government* adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efisiensi pemerintah
- b. Memberikan akses informasi kepada yang berkepentingan
- c. Menjadikan penyelenggaraan pemerintah lebih bertanggungjawab dan transparan

Jadi, berdasarkan beberapa pemaparan mengenai manfaat dan tujuan dari *e-government* tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya aplikasi *e-planning* dengan pemanfaatan yang lebih baik atas sumber daya, proses dan teknologi informasi diharapkan dapat terwujud pula pemerintahan yang lebih baik yang dapat dirasakan bagi pemerintah, *stakeholder*, dan kalangan yang berkepentingan.

4. Prinsip-Prinsip *Electronic Government* (E-Government)

Pelaksanaan *e-government* di setiap negara tidaklah selalu sama, hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan, struktur organisasi, program kerja, dan visi dari masing-masing setiap negara. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan *e-government* di setiap negara harus didasarkan pada prinsip yang melandasi *e-government*. Menurut Indrajit (2002:11), ada empat prinsip utama dalam membangun dan menerapkan *e-government*, yaitu:

- a. Fokus pada perbaikan pemerintahan
- b. Membangun sebuah lingkungan yang kompetitif
- c. Memberikan penghargaan pada inovasi dan ruang kesempatan bagi kesalahan. Konsep *e-government* merupakan sebuah pendekatan yang masih baru, dimana semua bangsa dan negara melakukan eksperimen dengannya. Adalah suatu hal yang normal apabila dari sedemikian

banyaknya program dan portofolio *e-government* ditemukan keberhasilan, sementara di lain pihak kerap dijumpai kegagalan, atau di satu pihak banyak sekali yang mendukung dan di pihak lain yang menentang juga sedikit

- d. Penekanan pada pencapaian efisiensi. Sistem pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi digital atau internet menjadi jalur alternatif dalam proses kegiatan yang dijalankan agar pemerintahan menjadi sangat efisien

Menurut Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI) yang dikutip oleh Habibullah (2010:191) juga menyatakan bahwa setidaknya ada enam (6) aspek esensial dalam pengembangan *e-government*, yaitu:

- a. Manajemen dan organisasi, menyangkut suatu unit organisasi dalam pemerintahan yang memiliki kewenangan dan kompetensi yang diperlukan untuk mendesain dan mengelola *e-government*
- b. Penggunaan teknologi, menyangkut tentang investasi penting untuk membuat jaringan mendukung *e-government* dan juga perangkat lunak yang akan digunakan (*software, hardware dan brainware*)
- c. Operasi internal, menyangkut aplikasi untuk operasi internal ini sebenarnya memegang kunci pokok dalam kinerja *e-government* secara keseluruhan. Hal ini karena kehandalan internal manajemen dalam melakukan segala prosedur, biaya, waktu dan orang akan sangat mempengaruhi kinerja *e-government* setelah tercipta

- d. Partisipasi dan komunikasi, adalah apakah aplikasi dapat diamati dan digunakan dengan baik
- e. Komunikasi pemerintah dan pemerintah, adalah apakah *e-government* dapat berhubungan antar pemerintah dalam pertukaran informasi
- f. Isu kebijakan adalah apakah *e-government* dapat menempatkan suatu privasi, menjamin keamanan diri pengguna informasi dan penentuan besar biaya dari setiap transaksi

Prinsip-prinsip di atas merupakan landasan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan aplikasi *e-planning*, dan setiap pemerintahan setidaknya menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam pelaksanaan *e-government* terutama aplikasi *e-planning* di Kementerian Perhubungan agar tercipta tata pemerintahan yang efisien, efektif, transparansi, akuntabilitas dan yang terpenting dapat melaksanakan tujuan-tujuan yang menjadi prioritas program kerja Kementerian Perhubungan.

5. Tantangan *Electronic Government* (E-Government)

Menurut Sari dan Winarno (2012:16), pemanfaatan *e-government* di Indonesia terus dikembangkan. Hal ini membuktikan bahwa masa depan sistem *e-government* sangatlah baik namun tetap memiliki beberapa tantangan yaitu:

- a. Pengembangan infrastruktur yang merata

Dengan kondisi geografis Indonesia yang memiliki banyak pulau dan daerah terpencil, maka pemerintah perlu meningkatkan pemerataan

infrastruktur baik dari segi teknologi informasi dan sumber daya manusia di seluruh pelosok Indonesia

- b. Terdapatnya dukungan dari lembaga perwakilan rakyat

Meski sebagai wakil rakyat, kenyataannya DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) cenderung seringkali tarik ulur dan mempersulit dalam pengesahan Undang-Undang mengenai pengembangan *e-government* di Indonesia

- c. Tercapainya keberhasilan dalam penerapan *e-government*

Dari segi ekonomi, pengembangan *e-government* di suatu negara termasuk Indonesia materi yang tidak sedikit. Oleh karena itu, materi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah harus dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang diharapkan

- d. Pemberian penghargaan dan fasilitas yang memadai bagi para ahli

Indonesia memiliki banyak SDM yang ahli dalam bidang teknologi, namun kebanyakan menetap di luar negeri. Oleh karenanya, pemerintah perlu lebih menghargai dan memberikan fasilitas bagi para ahli, guna meningkatkan perkembangan *e-government* di Indonesia. Selain itu memberikan pelatihan pembelajaran dan sosialisasi mengenai pentingnya pemanfaatan teknologi dan *e-government* bagi SDM yang ada di Indonesia.

Dalam pelaksanaan sistem *e-government* yang bertujuan untuk perbaikan tata kelola pemerintahan, masih terdapat beberapa masalah yang dihadapi salah satunya yang menjadi masalah utama adalah resistensi dan

kebimbangan saat menghadapi dan menyikapi inovasi untuk mengubah kebiasaan lama hingga menjadi lebih efisien dan efektif. Menurut Kumorotomo (2008:4) terdapat tiga aspek besar permasalahan dalam pelaksanaan sistem *e-government*, di antaranya adalah:

a. Aspek Budaya

- 1) Resistensi dan penolakan dari beberapa jajaran aparat pemerintah terhadap sistem *e-government*
- 2) Kurangnya kesadaran pada manfaat dan penghargaan terhadap teknologi yang dipergunakan dalam sistem *e-government*
- 3) Keengganan berbagi data dan informasi agar terintegrasi secara nasional di seluruh lembaga pemerintahan pengguna sistem *e-government*

b. Aspek Kepemimpinan

- 1) Terjadi konflik kepentingan di tingkat pemerintahan baik pusat maupun daerah
- 2) Peraturan yang belum tersosialisasikan dan penerapannya belum merata
- 3) Pengalokasian anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang memanfaatkan sistem *e-government* dalam APBN/APBD belum menjadi prioritas

c. Aspek Infrastruktur

- 1) Adanya ketimpangan digital yang mengakibatkan belum meratanya ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi,

mengingat secara geografis wilayah Indonesia tersebar di berbagai kepulauan

- 2) Ketersediaan infrastruktur untuk pengadaan teknologi informasi dan komunikasi masih terpusat di kota-kota besar. Tenaga ahli di negara terpencil pun masih sangat jarang, bahkan dapat dikatakan tidak ada
- 3) Sistem pemerintahan di Indonesia tidak memiliki standar yang baku.

Terdapat permasalahan atau tantangan dari *e-government* yang telah dipaparkan di atas yang berkaitan dengan pelaksanaan aplikasi *e-planning* di Kementerian Perhubungan yang dapat berdampak buruk dalam pelaksanaannya. Namun, pihak Kementerian Perhubungan perlu adanya upaya untuk melalui permasalahan atau tantangan yang ada.

E. Sistem Informasi Manajemen (SIM)

1. Definisi Sistem Informasi

Susanto (2004:54) memaparkan bahwa sistem informasi adalah kumpulan dari sub sistem fisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan yaitu mengolah data menjadi informasi yang berguna. Menurut Sastradipoera (2001:30) bahwa sistem informasi adalah seperangkat prosedur yang terorganisasi dengan sistematis yang jika dilaksanakan akan menyediakan informasi yang dimanfaatkan dalam proses pembuatan

keputusan dan proses pengawasan. Tugas dari sistem informasi adalah melakukan siklus pengolahan data. Untuk melakukan siklus ini maka sebagai suatu sistem diperlukan komponen-komponen tertentu. Komponen dari sistem informasi menurut Susanto (2004:60) yaitu sebagai berikut:

- a. perangkat keras (*hardware*) yang mencakup peranti-peranti fisik seperti komputer dan *printer*
- b. perangkat lunak (*software*) yaitu program sekumpulan intruksi yang memungkinkan perangkat keras untuk memproses data
- c. manusia (*brainware*) dimana semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem informasi, pemrosesan, dan penggunaan sistem informasi.
- d. prosedur (*procedure*) yaitu sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan pemrosesan data dan pembangkitan keluaran yang dikehendaki
- e. basis data (*database*) yaitu sekumpulan tabel, hubungan dan lain-lain yang berkaitan dengan penyimpanan data
- f. jaringan komunikasi (*communication network*) yaitu sistem penghubung yang memungkinkan sumber (*resources*) dipakai secara bersama atau diakses oleh sejumlah pemakai.

Berdasarkan beberapa pemaparan mengenai sistem informasi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa sistem informasi merupakan suatu sistem di dalam suatu organisasi yang sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan keputusan dan proses pengawasan pelaksanaan aplikasi *e-planning* di Kementerian Perhubungan, serta dengan adanya komponen-komponen sistem informasi, sebuah sistem informasi seperti *e-planning* dapat melakukan siklus pengolahan data untuk dijadikan informasi yang berguna bagi para pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan.

2. Ruang Lingkup Sistem Informasi Manajemen (SIM)

Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah keseluruhan jaringan informasi yang digunakan di suatu organisasi, dengan memanfaatkan

teknologi untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan. Seperti yang diungkapkan oleh Marmoah (2016:247) bahwa sistem informasi manajemen merupakan sebuah sistem manusia/mesin yang terpadu (*integrated*) untuk menyajikan informasi guna mendukung operasi dan manajemen dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Menurut Marmoah, sistem ini merupakan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) komputer, prosedur pedoman, model manajemen keputusan, dan sebuah *database*.

Penjelasan lain diungkapkan oleh Rochaety, Ridwan dan Setyowati (2013:9), sistem informasi manajemen merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengolah dan mengambil kembali data dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan sebuah perusahaan. Dengan penggunaan sistem informasi manajemen di dalam suatu organisasi dapat mempermudah pelaksanaan tugas pokok pimpinan. Menurut Siagian yang dikutip oleh Arifianti (2010:4), agar dapat mengambil keputusan yang logis maka dibutuhkan sistem informasi yang baik, lengkap, benar dan *up to date*. Tujuan sistem informasi manajemen tidak hanya mempermudah pimpinan dalam pengambilan keputusan tetapi dapat digunakan untuk mempermudah dan memperlancar tugas-tugas perencanaan, tugas-tugas pengaturan pelaksanaan dan tugas-tugas pengendalian.

Perlu adanya ketersediaan sumber daya manusia untuk mengolah SIM dan ketersediaan dana dalam pengadaan teknologi seperti komputer agar

pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) berjalan efektif dan efisien. SIM merupakan suatu pemikiran terus menerus untuk selalu mencari dan menemukan sistem informasi yang lebih baik. Kemudian pelaksanaannya perlu dikelola dengan baik pula. SIM membutuhkan rancangan sistem yang menyeluruh yang harus dilakukan dengan berhati-hati (Arifianti, 2010:3).

Menurut Gordon (2002:15), SIM tidak hanya perkembangan suatu teknologi namun berhubungan dengan organisasi dan sumber daya manusia sebagai pengelola. Oleh sebab itu, perlu pemahaman utuh terhadap sistem informasi keorganisasian berdasarkan komputer termasuk memahami konsep-konsep yang berhubungan dengan informasi, pemakaian informasi, dan nilai informasi. Berikut merupakan gambar tabel mengenai konsep utama Sistem Informasi Manajemen.

Tabel 1. Konsep Pokok Sistem Informasi Manajemen (SIM)

Konsep	Penjelasan
Konsep Informasi	Informasi menambahkan sesuatu pada penyajian. Yaitu sehubungan dengan waktu dan mutu.
Konsep manusia sebagai pengolah informasi	Kemampuan manusia sebagai pengolah informasi menentukan keterbatasan dalam sistem informasi dan mengesankan dasar-dasar rancangan mereka.
Konsep sistem	Karena sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem, maka konsep sistem perlu untuk memahami dan merancang rancangan pengembangan sistem informasi.
Konsep organisasi dan manajemen	Sistem informasi berada di dalam sebuah organisasi dan dirancang untuk

	mendukung fungsi manajemen. Informasi adalah penentu yang penting dalam bentuk keorganisasian.
Konsep pengambilan keputusan	Rancangan SIM bukan hanya harus mencerminkan rancangan rasional terhadap optimasi, tetapi juga teori berperilaku pengambilan keputusan dalam organisasi.
Konsep nilai informasi	Informasi mengubah keputusan. Perubahan dalam nilai hasil akan menentukan nilai informasi.

Sumber: Gordon (2002:15)

Konsep-konsep pokok SIM seperti yang terdapat pada tabel di atas, dapat dipahami bahwa informasi menambah nilai suatu organisasi. Untuk mengolah suatu informasi, maka diperlukan sumber daya manusia yang selanjutnya informasi yang telah diolah dapat dijadikan sebagai penentu penting dalam bentuk keorganisasian seperti dalam proses pengambilan keputusan di dalam suatu organisasi. Sebuah organisasi yang memiliki sistem informasi yang baik akan memiliki keunggulan posisi dalam persaingan atas organisasi yang sistem informasinya lemah. Seperti halnya dalam pengolahan informasi mengenai aplikasi *e-planning* di Kementerian Perhubungan yang mana akan menjadi penentu dalam proses pengambilan keputusan. Jika sistem *e-planning* di Kementerian Perhubungan berjalan dengan baik, maka kegiatan penyusunan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) pada Kementerian Perhubungan akan berjalan dengan baik pula.

F. *E-Planning* di Kementerian Perhubungan

Aplikasi *e-planning* Kementerian Perhubungan merupakan sistem pendukung perencanaan atau *Planning Support System* yang berbasis komputer dan diakses secara *online* guna mendukung dan membantu proses penyusunan rencana kerja dan anggaran di lingkungan Kementerian Perhubungan. Aplikasi ini diatur dalam Instruksi Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2019 Melalui Aplikasi *E-Planning*.

Aplikasi tersebut merupakan sistem informasi manajemen untuk mengelola rencana kegiatan anggaran yang meliputi pengelolaan rencana strategis sebagai *platform* usulan kegiatan, pengelolaan tahapan proses pembahasan rencana kegiatan dan anggaran, pengelolaan usulan kegiatan dan kebutuhan anggaran, pemeriksaan dan verifikasi usulan kegiatan dan anggaran, evaluasi dan persetujuan usulan kegiatan pada setiap proses pembahasan (pagu kebutuhan, pagu indikatif, pagu anggaran sampai alokasi anggaran), pemutakhiran pagu anggaran terhadap usulan kegiatan, laporan RKA-K/L pagu kebutuhan, pagu indikatif, pagu anggaran, sampai alokasi anggaran, serta laporan statistik dan hasil analisa terhadap proses pembahasan dan perubahan usulan kegiatan.

Manfaat yang diharapkan dari dibangunnya aplikasi *e-planning* ini adalah sebagai berikut menurut Instruksi Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2019 Melalui Aplikasi *E-Planning* yaitu sebagai berikut:

1. Mendukung program reformasi birokrasi, khususnya pada proses perencanaan dan alokasi anggaran
2. Memudahkan proses pengajuan usulan kegiatan dan anggaran
3. Memudahkan proses analisa verifikasi usulan kegiatan dan anggaran
4. Memudahkan proses analisa tahapan pembahasan rencana kegiatan dan alokasi anggaran
5. Mencatat proses analisa tahapan pembahasan rencana kegiatan dan alokasi anggaran
6. Mencatat secara lengkap rencana kegiatan dan anggaran pada setiap proses pembahasan sampai pada akhir penetapan RKA-KL
7. Memberikan informasi yang cepat dan real-time pada setiap pembahasan rencana kegiatan dan alokasi anggaran

Aplikasi *e-planning* sebagai sistem perencanaan kegiatan pada Kementerian Perhubungan diharapkan mempunyai manfaat yang menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas RKA Kementerian Perhubungan sebagai bagian dari implementasi tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam proses perencanaan menurut buku user manual aplikasi *e-planning* Kementerian Perhubungan yaitu:

1. *Evidence based planning* dalam setiap tahapan perencanaan
2. Mengurangi tatap muka antara perencana dengan Satker/UPT
3. Transparan, karena dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
4. Efisiensi kerja dengan sistem *online* yang terukur dan transparan
5. Mendukung program *go-green* dengan mengurangi salinan dokumen fisik (*less paper*) dalam proses pengusulan dan perencanaan RKA pada Kementerian Perhubungan
6. Pengiriman data usulan dari satker dan UPT dilakukan secara cepat, lengkap dan murah
7. Menyediakan *database* yang terintegrasi mengenai seluruh usulan kegiatan dan anggaran yang ada di Kementerian Perhubungan
8. Memperkuat peran Eselon 1, Biro dan Inspektorat sebagai koordinator mekanisme perencanaan satu pintu
9. Mempercepat proses penilaian telaah dan evaluasi usulan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran Kementerian Perhubungan *Paperless* dan pengelolaan berkas lebih baik mengurangi intervensi dari luar dalam pengalokasian anggaran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian pada umumnya dilakukan sebagai suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran, dan mencari kembali suatu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Menurut Sugiyono (2015:5), metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan status pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Menurut Moleong (2012:4), penelitian deskriptif adalah penelitian yang data-datanya dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Deskriptif merupakan laporan yang berisi kutipan untuk memberikan gambaran penyajian laporan. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan dan dokumen resmi lainnya. Menurut Creswell (2016:4), bahwa penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Siapapun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang induktif,

terfokus pada makna individual dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif ialah penelitian yang mengungkapkan fakta tentang suatu objek, gejala atau keadaan dengan menggambarkan, menguraikan, dan dengan mengambil suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti menggali data secara mendalam dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Data yang diperoleh dipaparkan secara deskriptif yang dimaksudkan untuk mengetahui suatu permasalahan tidak hanya dari permukaannya saja namun juga ke dasar masalah. Dalam hal ini, peneliti akan mengetahui efektivitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan aplikasi *e-planning* di Kementerian Perhubungan.

B. Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2012:97) bahwa dalam suatu penelitian kualitatif diperlukan suatu fokus penelitian agar peneliti dapat memberi batasan pada obyek yang diteliti sesuai dengan permasalahan penelitian dan dapat menghindari data-data yang tidak relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini fokus penelitian yang digunakan antara lain:

1. Efektivitas pelaksanaan aplikasi *e-planning* di Kementerian Perhubungan sebagai berikut:
 - a. Ketepatan sasaran dari pelaksanaan aplikasi *e-planning* di Kementerian Perhubungan, dengan melihat sejauh mana satuan kerja

Kementerian Perhubungan menerima kebijakan tersebut dengan sasaran yang tepat dan sudah ditentukan sebelumnya.

- b. Sosialisasi pelaksanaan aplikasi *e-planning* di Kementerian Perhubungan, kemampuan Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan dalam melakukan sosialisasi program tersebut, sehingga informasi pelaksanaan aplikasi *e-planning* dapat tersampaikan kepada seluruh satuan kerja Kementerian Perhubungan.
 - c. Pencapaian tujuan pelaksanaan aplikasi *e-planning* di Kementerian Perhubungan, untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian antara hasil dari pelaksanaan aplikasi *e-planning* dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
 - d. Pemantauan pelaksanaan aplikasi *e-planning* di Kementerian Perhubungan, yaitu pengawasan yang dilaksanakan pada pelaksanaan aplikasi *e-planning* dilakukan.
2. Faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan aplikasi *e-planning* yang dijelaskan sebagai berikut:
- a. Faktor pendukung pelaksanaan aplikasi *e-planning* di Kementerian Perhubungan
 - b. Faktor penghambat pelaksanaan aplikasi *e-planning* di Kementerian Perhubungan

C. Lokasi Penelitian

Menurut Moleong (2012:128), lokasi penelitian merupakan tempat bagi peneliti untuk menggambarkan kejadian sebenarnya dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Menurut Nasrudin (2017:4), lokasi penelitian dipilih untuk mempersempit ruang lingkup pembahasan dan untuk mempertajam fenomena yang dikaji sesuai dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini dilakukan pada Kementerian Perhubungan yang berada di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta Pusat. Lokasi tersebut berkaitan dengan pelaksanaan aplikasi *e-planning* di Kementerian Perhubungan. Lokasi tersebut dipilih oleh peneliti karena mengingat aplikasi *e-planning* yang baru dilaksanakan sekitar satu tahun di lingkungan Kementerian Perhubungan dimana lokasi tersebut berada di Provinsi DKI Jakarta yang merupakan Ibukota Indonesia dan menjadi pusat pemerintahan yang memiliki fungsi serta peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, sehingga peneliti tertarik untuk melihat apakah pelaksanaan aplikasi *e-planning* tersebut sudah efektif atau sebaliknya.

D. Sumber dan Jenis Data

Menurut Lofland dan Lofland yang dikutip oleh Moleong (2012:157), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data menjadi instrumen penting dalam penelitian untuk informasi akurat terkait

penelitian. Hal itu dikarenakan penelitian kualitatif cenderung mengutamakan wawancara (*interview*) dan pengamatan langsung (*observasi*) di lapangan dalam memperoleh data yang bersifat tambahan. Berkaitan dengan hal itu, pada bagian ini jenis data dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik. Secara umum, terdapat dua jenis data yang terdiri dari:

1. Data primer, yaitu data yang berkaitan dengan fokus penelitian dan diperoleh langsung oleh peneliti selama berada di lokasi penelitian. Data tersebut merupakan bahan analisis utama yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh dari Kementerian Perhubungan.
2. Data sekunder, yaitu data tambahan yang berasal dari sumber tertulis dan digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer. Data-data yang dijadikan informasi yakni Peraturan Perundang-undangan, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri Perhubungan, Peraturan Menteri Perhubungan, Instruksi Menteri Perhubungan, Undang-Undang RI, buku *user manual* aplikasi *e-planning* Kementerian Perhubungan, buku prosedur aplikasi *e-planning* Kementerian Perhubungan dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data ini dapat diperoleh dari Kementerian Perhubungan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2015:309) bahwa teknik pengumpulan data merupakan proses utama dalam penelitian dalam mengumpulkan data dan informasi yang akurat sesuai dengan objek yang diteliti dan terdapat berbagai macam teknik pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Menurut Arifin (2011:231) observasi adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Bungin (2007:115) observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu dengan panca indera lainnya.

Observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi non partisipan, dimana peneliti tidak ikut serta terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang subyek lakukan dan secara terpisah berkedudukan sebagai pengamat (Margono, 2005:161). Observasi berdasarkan uraian yang telah dipaparkan oleh para ahli di atas berarti memiliki tujuan untuk memperoleh data dan informasi akurat yang terjadi di lapangan melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang dilakukan di Kementerian Perhubungan. Tujuan observasi dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan aplikasi *e-planning* di Kementerian Perhubungan, sehingga didapatkan hasil apakah pelaksanaan tersebut efektif atau sebaliknya.

2. Wawancara

Menurut Moleong (2012:186), wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, dimana percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Teknik pengumpulan data dengan wawancara membantu peneliti untuk lebih memahami secara mendalam mengenai objek yang diteliti. Seperti yang diungkapkan Stainback yang dikutip oleh Sugiyono (2015:318), dengan wawancara maka peneliti mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara terstruktur (*structured interview*), dimana peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis sesuai dengan rumusan masalah atau fokus penelitian terkait yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan lalu setiap informan diberi pertanyaan yang sama dan peneliti akan mencatatnya (Sugiyono, 2015:318). Berdasarkan penjelasan menurut para ahli di atas, wawancara dilakukan di Kementerian Perhubungan antara peneliti dan informan untuk mengumpulkan data primer dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan aplikasi *e-planning* di Kementerian Perhubungan. Berikut informan yang dijadikan sumber informasi dalam penelitian ini.

Tabel 2. Daftar Informan Wawancara

No.	Nama	Jabatan
1.	Bapak Gede Pasek	Kepala Biro Perencanaan
2.	Bapak Dandun Prakosa	Kepala Bagian Program
3.	Ibu Dwi Utami	Kepala Sub Bagian Program Transportasi Laut
4.	Bapak Bintang Anugrah	Staff Sub Bagian Program Transportasi Laut
5.	Bapak Ibrahim	Staff Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Hubla
6.	Bapak Victor Basa	Staff Direktorat Navigasi Penerbangan Ditjen Hubud
7.	Ibu Jovita Sibarani	Staff Direktorat Angkutan dan Multimoda Ditjen Hubdat

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2019

3. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2006:158), dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapot, agenda dan sebagainya. Menurut Sugiyono (2015:329) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Berdasarkan pemaparan para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dan memperoleh data atau informasi yang kemudian ditelaah untuk menghimpun berbagai data sekunder. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya Peraturan Menteri Perhubungan, Keputusan Menteri Perhubungan, profil Kementerian Perhubungan, buku pedoman,

pernyataan dari berita yang disiarkan melalui media massa dan lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan aplikasi *e-planning*. Sedangkan dokumen yang berbentuk gambar misalnya hasil foto di lapangan terkait pelaksanaan aplikasi *e-planning*.

F. Instrumen Penelitian

Menurut Arikunto (2010:203) instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Menurut Sugiyono (2015:92) instrumen penelitian adalah suatu alat pengumpul data yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan instrumen penelitian yaitu untuk mencari informasi agar mendapatkan hasil yang lengkap mengenai suatu permasalahan yang akan diteliti. Berikut instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu:

1. Peneliti sendiri sebagai *human instrument* akan mengamati proses permasalahan penelitian. Menurut Moleong (2012:168) peneliti sebagai instrumen penelitian karena peneliti sebagai perencana, pelaksana pengumpul data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya menjadi pelapor hasil penelitian.
2. Pedoman wawancara (*interview guide*) berupa daftar pertanyaan terkait penelitian. Menurut Arikunto (2010:227) pedoman wawancara yakni

pedoman yang terdiri dari pertanyaan yang disusun secara terperinci dan akan diajukan kepada narasumber terkait yang diharapkan ada umpan balik dari pertanyaan yang diajukan.

3. Perangkat penunjang penelitian berupa catatan ringkas yang dibuat peneliti, *smartphone* sebagai alat perekam suara dan pengambilan gambar, *flashdisk* sebagai alat penyimpanan data dalam transfer data yang diberikan oleh informan kepada peneliti, serta *laptop* untuk mengetik hasil wawancara yang didapati oleh peneliti.

G. Metode Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen yang dikutip oleh Moleong (2012:248), analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Menurut Sugiyono (2015:336) analisis data kualitatif lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

Berdasarkan pemaparan para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa metode analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam

pola, memilih dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014:31) menyebutkan bahwa metode analisis data dalam penelitian kualitatif dapat dilihat pada gambar berikut.

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pada tahap pengumpulan data, peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan kebutuhan data penelitian. Data yang dikumpulkan berupa data observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dibutuhkan selama penelitian berlangsung. Pada tahap wawancara dilakukan dengan melaksanakan wawancara di lingkungan Kementerian Perhubungan dan telah disesuaikan dengan fokus penelitian yaitu efektivitas pelaksanaan aplikasi *e-planning* di Kementerian Perhubungan. Sedangkan data yang berupa dokumen didapati sesuai dengan kebutuhan data penelitian yang bersumber dari dokumen resmi milik Kementerian Perhubungan.

2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data diartikan sebagai proses pemilihan, penyederhanaan dan transformasi data mentah yang didapat dari lapangan. Laporan lapangan disederhanakan dan dipilih hal-hal yang penting atau pokok, difokuskan pada hal-hal penting yang kemudian dicari polanya. Hal ini bertujuan untuk memperkuat data sebuah konsep yang berbeda dengan reduksi data yang terkesan melemahkan data dengan membuang data

yang diperoleh di lapangan. Kondensasi data ini berupa data hasil wawancara dengan para pimpinan dan staff di lingkungan Kementerian Perhubungan terkait pelaksanaan aplikasi *e-planning* yang kemudian dirangkum dengan tujuan mempermudah dalam membuat laporan penelitian. Data akan menjadi lebih akurat karena data yang diperoleh telah disaring dan diambil intisarinnya sehingga data lebih terfokus.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

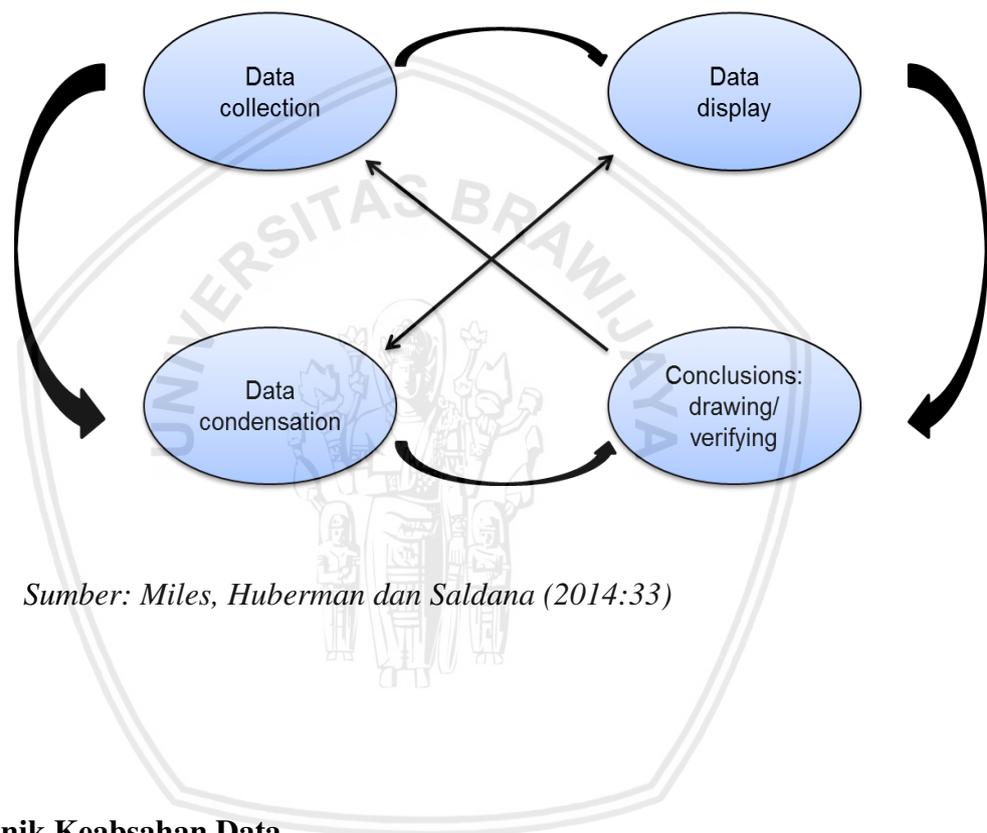
Data yang telah terkumpul dan diklasifikasikan selanjutnya disajikan baik dalam bentuk tabel maupun bentuk kalimat atau uraian. Penyajian data ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu gambaran umum dan penyajian data fokus penelitian. Gambaran umum berisikan gambaran terkait lokasi penelitian. Lokasi penelitian yaitu pada Kementerian Perhubungan, sedangkan penyajian data fokus penelitian menyajikan data yang telah dikondensasi berdasarkan fokus penelitian, penyajian yang dipaparkan berupa data dalam menjawab fokus peneliti dalam pelaksanaan aplikasi *e-planning* di Kementerian Perhubungan.

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verifying*)

Penarikan kesimpulan merupakan bagian akhir dalam kegiatan analisis. Dari hasil data yang diperoleh dari lapangan tersebut kemudian dikumpulkan serta dianalisa untuk dapat ditarik kesimpulannya. Pada tahap ini setelah proses penyajian data dilakukan, peneliti menarik kesimpulan tentang pelaksanaan aplikasi *e-planning* di Kementerian Perhubungan. Penarikan kesimpulan ini adalah hasil dari analisis data

berdasarkan pada beberapa teori yang sudah dipaparkan peneliti pada tinjauan pustaka.

Gambar 2. Analisis Data Model Interaktif Miles, Huberman dan Saldana



Sumber: Miles, Huberman dan Saldana (2014:33)

H. Teknik Keabsahan Data

Adapun untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan maka peneliti menggunakan teknik pemeriksaan yang didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kredibilitas dan triangulasi. Menurut Sugiyono (2015:120) kredibilitas adalah teknik pemeriksaan yang digunakan seperti ketekunan pengamatan dalam artian peneliti bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan

atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Kredibilitas bisa dilakukan dengan memperpanjang masa pengamatan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan, meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan.

Menurut Sugiyono (2015:127) triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi yang digunakan peneliti adalah triangulasi sumber, dimana triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dari sumber tersebut tidak bisa dirata-ratakan tetapi dideskripsikan dan dikategorisasikan, mana pandangan yang sama dan yang berbeda, sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum terkait Penelitian

1. Sejarah Singkat Kementerian Perhubungan

Kementerian Perhubungan merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bergerak di bidang jasa transportasi. Kementerian Perhubungan yang dahulu bernama Departemen Perhubungan sudah berdiri sejak periode awal kemerdekaan Indonesia yang dibentuk berdasarkan periode Kabinet Republik Indonesia. Kabinet pertama yang membawahi forum ini disebut sebagai Kabinet Presidensiil. Periodenya dimulai pada 2 September 1945 hingga 14 November 1945. Pada saat itu, Menteri Perhubungan Negara Indonesia ialah Abikusno Tjokrosujono.

Masa kepemimpinan dari Abikusno pun berakhir dan digantikan dengan Ir. Abdulkarim pada Kabinet kedua yang disebut juga sebagai Kabinet Sjahrir. Kabinet ini dimulai pada 14 November 1945 hingga 12 Maret 1946. Kabinet Sjahrir berjalan hingga Kabinet Sjahrir III. Kabinet Sjahrir III ini berlangsung hingga 1947. Kabinet Sjahrir kemudian digantikan dengan Kabinet Amir Sjarifudin I dan II. Kementerian Perhubungan menjadi sebuah forum yang saat itu sepertinya cukup sibuk.

Pada Kabinet Ali Sastroamidjoyo ke II atau Kabinet Republik Indonesia Kesatuan ke-VI dipimpin oleh H. Sjuhar Tedjasukmana, yang dimulai pada 24 Maret 1956 hingga 9 April 1957, Kementerian Perhubungan memiliki program yang lebih menitikberatkan pada pemenuhan berbagai moda transportasi. Alat-alat transportasi tersebut dikhususkan bagi daerah-daerah. Terutama daerah yang berpotensi untuk menghasilkan berbagai bahan-bahan kebutuhan pokok. Selain itu, Kementerian Perhubungan saat itu juga memiliki program untuk mengawasi serta memajukan wahana transportasi yang dimiliki. Peningkatan terus dilakukan agar pesaing yang mulai datang tak menjadi ancaman bagi alat-alat transportasi yang ada di Indonesia. Kementerian Perhubungan semakin berkembang sinkron dengan kebutuhan.

Pada masa Kabinet Pembangunan IV dipimpin oleh Menteri Perhubungan Roesmin Nuryadin yang berlangsung dari 19 Maret 1983 hingga Maret 1988, Kementerian Perhubungan atau Departemen Perhubungan mulai memiliki beberapa direktorat. Pembagian direktorat tersebut dibedakan atas jenis alat transportasi yaitu, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Pembagian direktorat dalam forum milik pemerintah ini ditujukan untuk mempermudah kinerja. Perubahan demi perubahan pun terjadi pada Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan pun menjadi sebuah forum yang membawahi beberapa direktorat. Direktorat itu sendiri

kemudian membawahi beberapa kanwil yang tersebar di provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Saat ini, sedang ada pada periode Kabinet Kerja yang dipimpin oleh Menteri Budi Karya Sumadi sejak 27 Juli 2016.

2. Lokasi Kementerian Perhubungan

Kementerian Perhubungan berada di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta tepatnya di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta Pusat. Kementerian Perhubungan berada di antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Gambar 3. Gedung Kementerian Perhubungan



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2019

3. Visi dan Misi Kementerian Perhubungan

Visi Kementerian Perhubungan adalah “Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah”. Pelayanan transportasi yang handal, diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang aman (*security*), selamat (*safety*), nyaman (*comfortable*), tepat waktu (*punctuality*), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan nasional. Pelayanan transportasi yang berdaya saing diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang efisien, dengan harga terjangkau (*affordability*) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif.

Pelayanan transportasi yang memberikan nilai tambah diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong pertumbuhan produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya peranserta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh pelosok tanah air, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi.

Untuk mencapai visi tersebut dapat dirumuskan misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi.

Dalam upaya mengurangi atau menurunkan tingkat kecelakaan dari sektor transportasi pemerintah terus berupaya secara bertahap membenahi sistem keselamatan dan keamanan transportasi menuju kondisi *zero to accident*. Upaya yang dilakukan pemerintah tidak saja bertumpu kepada penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan namun peningkatan kualitas SDM transportasi, pembenahan regulasi di bidang keselamatan atau keamanan maupun sosialisasi kepada para pemangku kepentingan.

- b. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah.

Kebutuhan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan yang perlu mendapatkan perhatian adalah aksesibilitas di kawasan pedesaan, kawasan pedalaman, kawasan tertinggal termasuk kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar yang masih menjadi tanggungjawab pemerintah.

- c. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi.

Dalam kondisi keuangan negara yang terimbas krisis keuangan dunia tentunya sangat berpengaruh terhadap kinerja pelayanan jasa

transportasi karena masih terdapat beberapa operator yang memiliki keterbatasan kemampuan melakukan perawatan dan peremajaan armada, demikian pula pemerintah secara bertahap dengan dana yang terbatas melakukan rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur, sedangkan belum seluruh masyarakat pengguna jasa memiliki daya beli yang memadai.

Untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional perlu diupayakan peningkatan kinerja pelayanan jasa transportasi menuju kepada kondisi yang dapat memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat, sejalan dengan pemulihan pasca krisis keuangan global, melalui rehabilitasi dan perawatan sarana dan prasarana transportasi.

- d. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), dan penegakan hukum secara konsisten.

Sesuai dengan prinsip *good governance* melalui penerbitan 4 (empat) paket undang-undang di sektor transportasi telah dilaksanakan restrukturisasi dan reformasi dalam penyelenggaraan transportasi dengan pemisahan yang jelas antara peran pemerintah, swasta dan masyarakat. Restrukturisasi di bidang kelembagaan, menempatkan posisi Kementerian Perhubungan sebagai regulator dan melimpahkan sebagian kewenangan di bidang perhubungan kepada daerah dalam bentuk dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. Reformasi di bidang regulasi (*regulatory reform*) diarahkan kepada

penghilangan restriksi yang memungkinkan swasta berperan secara penuh dalam penyelenggaraan jasa transportasi.

Penegakan hukum dilakukan secara konsisten dengan melibatkan peranserta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa transportasi. Restrukturisasi dan reformasi di bidang SDM diarahkan kepada pembentukan kompetensi dan profesionalisme insan perhubungan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki wawasan global dengan tetap mempertahankan jati dirinya sebagai manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- e. Mewujudkan pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan jasa transportasi dititikberatkan kepada penambahan kapasitas sarana dan prasarana transportasi, perbaikan pelayanan melalui pengembangan dan penerapan teknologi transportasi yang ramah lingkungan sesuai dengan isu perubahan iklim (*global warming*) sejalan dengan perkembangan permintaan dan preferensi masyarakat. Dalam peningkatan kapasitas dan pelayanan jasa transportasi senantiasa berpedoman kepada prinsip pembangunan berkelanjutan yang dituangkan dalam rencana induk, pedoman teknis dan skema pendanaan yang ditetapkan.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Perhubungan

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, maka tugas pokok Kementerian Perhubungan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Selanjutnya pada Pasal 3, fungsi Kementerian Perhubungan yang dipaparkan sebagai berikut:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan operasi, aksesabilitas, konektivitas sarana dan prasarana transportasi
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi di daerah
- d. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi
- e. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia transportasi
- f. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan

- g. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan
- h. Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan
- i. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan

5. Struktur Organisasi Kementerian Perhubungan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Pasal 1 (satu) yaitu Kementerian Perhubungan dipimpin oleh Menteri Perhubungan yang bertanggungjawab kepada Presiden. Berikut dijelaskan struktur organisasi Kementerian Perhubungan yang terdiri atas:

- a. Inspektorat Jenderal
- b. Sekretariat Jenderal

Pasal 6 (enam) yaitu Sekretariat Jenderal bertugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang bertanggungjawab kepada Menteri. Berikut dijelaskan susunan organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan yang terdiri atas:

1) Biro Perencanaan

Pasal 9 (sembilan) yaitu Biro Perencanaan bertugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Perhubungan. Biro Perencanaan dipimpin oleh Kepala Biro Perencanaan yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal. Berikut dijelaskan susunan organisasi Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan yang terdiri atas:

a) Bagian Rencana

Melalui kepala bagian maupun staf dari Bagian Rencana bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan pengendalian kebijakan, penyusunan rencana jangka menengah, jangka panjang dan rencana bergulir, koordinasi penyusunan rencana pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang dibiayai dengan mekanisme Pinjaman atau Hibah Luar Negeri di lingkungan Kementerian Perhubungan, serta Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi unit Sekretariat Jenderal

b) Bagian Program

Melalui kepala bagian maupun staf dari Bagian Program bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penyusunan rencana jangka pendek, penyediaan dana pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang dibiayai dengan mekanisme Pinjaman atau

Hibah Luar Negeri, program dan anggaran serta penyelesaian dokumen pelaksanaan anggaran Kementerian Perhubungan dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

c) Bagian Pentarifan dan Pelaporan

Melalui kepala bagian maupun staf dari Bagian Pentarifan dan Pelaporan bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi, sinkronisasi dan penetapan pentarifan di bidang transportasi, bahan untuk lembaga negara dan pemerintah, pengelolaan jabatan fungsional di bidang perencanaan serta urusan tata usaha dan rumah tangga Biro

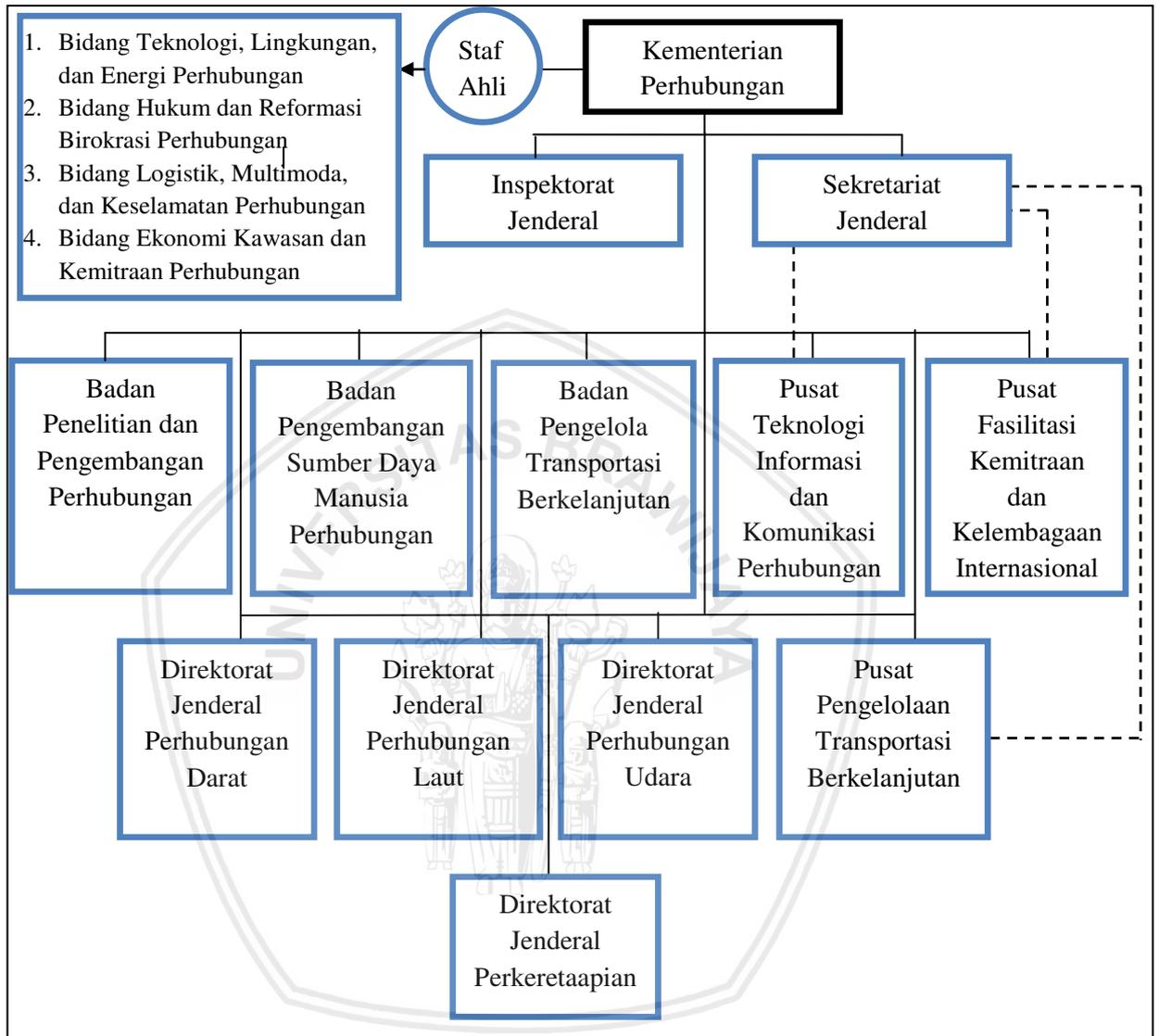
d) Bagian Analisa dan Evaluasi

Melalui kepala bagian maupun staf dari Bagian Analisa dan Evaluasi bertugas melaksanakan penyiapan analisis, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program Kementerian Perhubungan termasuk perkembangan fisik dan nilai manfaatnya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja Kementerian Perhubungan, pengendalian gratifikasi, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang dibiayai dengan mekanisme Pinjaman/Hibah Luar Negeri, serta Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

- 2) Biro Kepegawaian dan Organisasi
- 3) Biro Keuangan

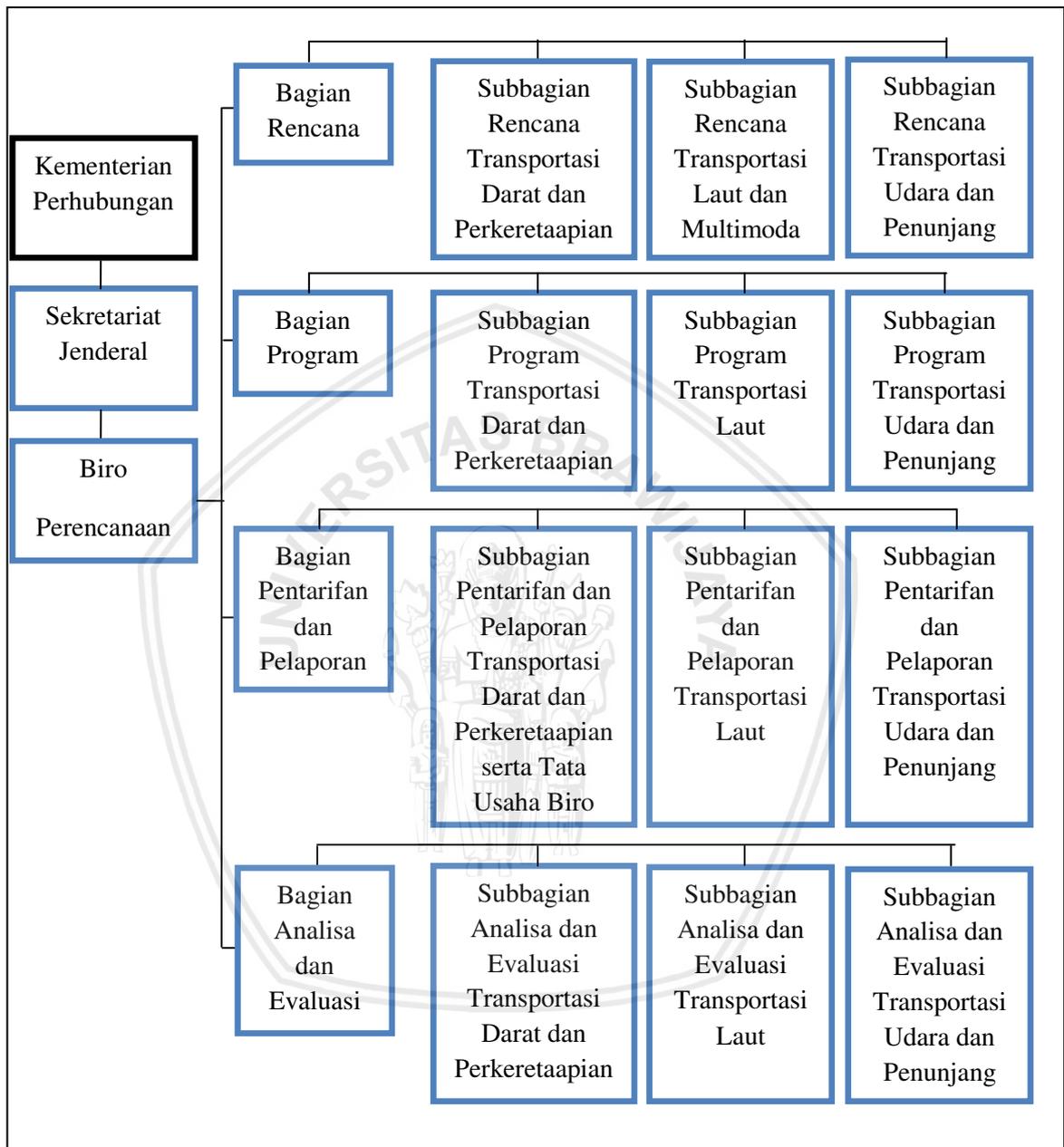
- 4) Biro Hukum
 - 5) Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN
 - 6) Biro Umum
 - 7) Biro Komunikasi dan Informasi Publik
- c. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
 - d. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
 - e. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
 - f. Direktorat Jenderal Perkeretaapian
 - g. Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - h. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
 - i. Badan Pengelola Transportasi Berkelanjutan
 - j. Staf Ahli Bidang Teknologi, Lingkungan, dan Energi Perhubungan
 - k. Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan
 - l. Staf Ahli Bidang Logistik, Multimoda, dan Keselamatan Perhubungan
 - m. Staf Ahli Bidang Ekonomi Kawasan dan Kemitraan Perhubungan
 - n. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan
 - o. Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan
 - p. Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional

Gambar 4. Struktur Organisasi Kementerian Perhubungan



Sumber: Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

Gambar 5. Struktur Organisasi Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan



*Sumber: Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan*

6. Gambaran Umum Aplikasi *E-Planning*

E-planning merupakan aplikasi perencanaan *online* untuk memproses kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L). Aplikasi ini diresmikan pada tanggal 1 Februari 2018 oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Sebelumnya Menteri Perhubungan telah mengeluarkan Instruksi Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2019 Melalui Aplikasi *E-Planning* dan Instruksi Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kelengkapan Data Dukung Minimum Usulan Kegiatan Pagu Kebutuhan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan Tahun 2019. Aplikasi *e-planning* Kementerian Perhubungan merupakan Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk mengelola rencana kegiatan anggaran yang meliputi :

- a. Pengelolaan rencana strategis sebagai *platform* usulan kegiatan
- b. Pengelolaan tahapan proses pembahasan rencana kegiatan dan anggaran
- c. Pengelolaan usulan kegiatan dan kebutuhan anggaran
- d. Pemeriksaan dan verifikasi usulan kegiatan dan anggaran
- e. Evaluasi dan persetujuan usulan kegiatan pada setiap proses pembahasan (pagu kebutuhan, pagu indikatif, pagu anggaran sampai alokasi anggaran)
- f. Pemutakhiran pagu anggaran terhadap usulan kegiatan

- g. Laporan RKA-K/L pagu kebutuhan, pagu indikatif, pagu anggaran, sampai alokasi anggaran
- h. Laporan statistik dan hasil analisa terhadap proses pembahasan dan perubahan usulan kegiatan

Cara kerja *e-planning* yaitu merencanakan kegiatan yang akan direalisasikan pada tahun berikutnya. Aplikasi *e-planning* diciptakan agar tidak terlepas dari standar prioritas serta arah kebijakan strategis perencanaan di lingkungan Kementerian Perhubungan dan memudahkan kontrol antar Kementerian/Lembaga. Berikut ini merupakan gambaran mengenai aplikasi *e-planning* yang telah dibuat oleh pihak Kementerian Perhubungan, diantaranya adalah:

- a. Untuk masuk ke dalam aplikasi, terlebih dahulu user diharuskan untuk mengakses alamat <http://eplanning.dephub.go.id> dan mengisi *username*, *password*, serta kode *captcha* pada kolom yang telah disediakan. *Input* menggunakan *username* dan *password* pegawai Kementerian Perhubungan karena aplikasi ini hanya bisa diakses oleh pegawai Kementerian Perhubungan saja. Kemudian klik tombol *login*, lalu muncul tampilan seperti berikut:

Gambar 6. Halaman Login Aplikasi *E-Planning*



E-Planning & Budgeting
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

LOGIN PENGGUNA

Username

Password

9
45 4

Captcha

Re-load Pages

Lupa Password

LOGIN

Copyright © Kementerian Perhubungan 2016

Sumber: Buku User Manual Aplikasi E-Planning Kementerian Perhubungan

- b. Setelah user berhasil login, aplikasi akan menampilkan halaman utama seperti berikut:

Gambar 7. Halaman Utama Aplikasi E-Planning

E-Planning & Budgeting
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Testing Monitoring

Dashboard RKA - K/L Laporan Informasi

Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2019 Tahapan Penetapan Alokasi Anggaran

JADWAL KEGIATAN 01 Desember 2018 - 31 Desember 2018

Pagu Kebutuhan Pagu Indikatif Pagu Anggaran **Alokasi Anggaran**

Kegiatan	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai
PENYUSUNAN RKA - K/L SATKER	01 Desember 2018	03 Desember 2018
INPUT USULAN DAN KEGIATAN OLEH SATKER	06 November 2018	30 November 2018
PENELITIAN DAN PERSETUJUAN USULAN	01 Desember 2018	11 Desember 2018
REVISI DAN USULAN BARU	20 Desember 2018	31 Desember 2018

OVERVIEW Status pengusulan kegiatan...

Prosentase Usulan Satker Tahun Pembahasan 2018

Semua Unit Kerja

Kategori	Persentase
Sudah Menginput	99,2%
Belum Menginput	0,8%

ALOKASI ANGGARAN (01 Desember 2018 - 31 Desember 2018)

No	Program - Kegiatan	Alokasi Anggaran (dalam rupiah)
01	Program Sekretariat Jenderal	948.094.394.000
03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perhubungan	100.311.699.000
04	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan	231.367.265.000
05	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	5.770.961.526.000
06	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	3.824.355.372.000
05	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	5.770.961.526.000
01	Program Sekretariat Jenderal	948.094.394.000
03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perhubungan	100.311.699.000
04	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan	231.367.265.000
05	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	5.770.961.526.000
06	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	3.824.355.372.000
07	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	14.386.097.847.000
08	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	14.476.511.983.000
09	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	11.557.697.693.000
10	Program Pengelolaan Transportasi Jabodetabek	0
TOTAL		51.295.397.779.000

Sumber: Buku User Manual Aplikasi E-Planning Kementerian Perhubungan

Keterangan gambar

A : Menampilkan nama aplikasi dan logo instansi

- B : *Panel User Info*, berisi informasi mengenai user yang sedang aktif yang dilengkapi dengan tombol pintas data pribadi, *my account*, jadwal pembahasan dan tombol *logout*
- C : Menu dan sub menu aplikasi *e-planning* yang terdiri atas Dashboard, RKA-K/L, Laporan, dan Informasi
- D : *Panel Breadcrumb*, menunjukkan informasi menu atau sub menu yang sedang aktif
- E : Panel Dinamis Data Informasi, berisi data dan informasi sesuai dengan menu atau sub menu yang dipilih oleh pengguna aplikasi.

Berikut ini adalah tahapan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kementerian Perhubungan yang meliputi input usulan dan upload persyaratan yang dilakukan pada saat posisi tahapan *process*. Berikut merupakan langkah-langkah untuk input usulan dan upload persyaratan:

Gambar 8. Tabel Data Usulan Kegiatan dan Anggaran

RKA-K/L > Usulan Kegiatan dan Anggaran

TABEL DATA USULAN KEGIATAN DAN ANGGARAN

Tahapan Pembahasan: PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN BERDASARKAN ALOKASI ANGGARAN
 Tahun Anggaran: 2019
 Satker: 512802 KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH I
 K/L - Unit: 022.05 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

	KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Prog	022.05.09	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara				57.667.863.000
Keg	1961	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara				3.320.556.000
Out	1961.034	Peralatan Penunjang Bandara	0,00	unit, set, paket		3.320.556.000
Keg	1965	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Udara				54.347.307.000
Out	1965.003	Laporan Bidang Keuangan	0,00	dok		34.982.948.000
Out	1965.994	Layanan Perkantoran	0,00	Bulan Layanan		17.241.086.000
Out	1965.996	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0,00	Unit		1.135.273.000
Out	1965.997	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	0,00	Unit		988.000.000

Sumber: Buku User Manual Aplikasi E-Planning Kementerian Perhubungan

Keterangan

1 : Menambahkan daftar *output* yang ditetapkan, sehingga tampil sebagai berikut

Gambar 9. Tambah Data

TAMBAH DATA ← Kembali

Tahapan Pembahasan: PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN BERDASARKAN ALOKASI ANGGARAN
 Tahun Anggaran: 2019
 Satker: 512802 KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH I
 K/L - Unit: 022.05 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

KODE	PROGRAM / KEGIATAN STRATEGIS	INDIKATOR	PRIORITAS	PILIH
Kegiatan sudah diinputkan / Belum dibuka kegiatan untuk satker anda (hubungi administrator).				

Tambahkan

Sumber: Buku User Manual Aplikasi E-Planning Kementerian Perhubungan

Tandai *output* yang dipilih, klik “Tambahkan”

2 : Menambah daftar usulan yang tertunda, sehingga tampil sebagai berikut

Gambar 10. Daftar Usulan Tertunda

DAFTAR USULAN TERTUNDA ← Kembali

Pencarian: Tahun: Uraian Usulan: Cari Batal

Menampilkan 0 - 0 dari 0 data

No.	OUTPUT / URAIAN USULAN	NILAI USULAN	TAHUN	STATUS	PILIH
Data tidak ditemukan !					

Tambahkan

Sumber: Buku User Manual Aplikasi E-Planning Kementerian Perhubungan

Tandai usulan yang dipilih, klik “Tambahkan”

- 3 : Jika usulan yang dikehendaki sudah, klik tombol  untuk melihat detail data dari *output* yang dikehendaki, sehingga tampil sebagai berikut

Gambar 11. Tabel Data Usulan



TABEL DATA USULAN

Tahun Anggaran: 2019 Program: 022.05
 Tahapan: PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN BERDASARKAN ALOKASI ANGGARAN Kegiatan:
 Satker: 512802 KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH I Output:
 K/L - Unit: 022.05 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | DITJEN PERHUBUNGAN UDARA Indikator Kinerja:

Pencarian:

	KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA	JUMLAH	PERSYARATAN	
sOut	1961.034.001	PERALATAN PENUNJANG BANDARA	0,00	unit, sec paket		3.320.556.000	0 dari 0 files	
kmp	011	Belanja Barang dalam rangka non operasional perkantoran				3.320.556.000		
skmp	A	BELANJA BARANG DALAM RANGKA NON OPERASIONAL PERKANTORAN				3.320.556.000		
Akun	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				3.320.556.000		
		-- Alat uji ground support equipment	1,00	PKT	214.500.000	214.500.000		
		-- Alat ukur portable ILS/ VOR receiver	1,00	PKT	955.825.000	955.825.000		
		-- Perengkapan pengawasan dan pengendalian heliport, helideck dan waterbased	1,00	PKT	63.000.000	63.000.000		
		-- Pengadaan perlengkapan inspector	1,00	PKT	1.977.231.000	1.977.231.000		
		-- Honorarium panitia lelang	1,00	PKT	60.000.000	60.000.000		
		-- Biaya lelang, pembuatan dan penggandaan dokumen	1,00	PKT	50.000.000	50.000.000		

Sumber: Buku User Manual Aplikasi E-Planning Kementerian Perhubungan

- 4 : Jika usulan kegiatan belum terdaftar pada tabel usulan klik tombol



Gambar 12. Tambah Data Usulan

Tambah Data Usulan

Kegiatan **5**

Output

Nama Usulan *

Kelompok Persyaratan * Pilih

Volume * Wajib diisi

6 Simpan Reset

Sumber: Buku User Manual Aplikasi E-Planning Kementerian Perhubungan

5 : Masukkan data usulan baru

6 : Kemudian klik tombol 

Gambar 13. Tabel Data Usulan

TABEL DATA USULAN ← Kembali + Usulan Kegiatan Baru

Tahun Anggaran: 2019 Program: 022.05.

Tahapan: PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN BERDASARKAN ALOKASI ANGGARAN Kegiatan:

Satker: 512802 KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH I Output: .

K/L - Unit: 022.05 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | DITJEN PERHUBUNGAN UDARA Indikator Kinerja:

Pencarian: Cari Batal

	KODE	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA	JUMLAH	PERSYARATAN
sOut	1961.034.001	PERALATAN PENUNJANG BANDARA	0,00	unit, set, paket		3.320.556.000	0 dari 0 files 7
kmp	:011	Belanja Barang dalam rangka non operasional perkantoran				3.320.556.000	
skmp	A	BELANJA BARANG DALAM RANGKA NON OPERASIONAL PERKANTORAN				3.320.556.000	
akun	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				3.320.556.000	
		-- Alat uji ground support equipment	1,00	PKT	214.500.000	214.500.000	
		-- Alat ukur portable ILS/ VOR receiver	1,00	PKT	955.825.000	955.825.000	
		-- Perlengkapan pengawasan dan pengendalian heliport, helideck dan waterbased	1,00	PKT	63.000.000	63.000.000	
		-- Pengadaan perlengkapan inspector	1,00	PKT	1.977.231.000	1.977.231.000	
		-- Honorarium panitia lelang	1,00	PKT	60.000.000	60.000.000	
		-- Biaya lelang, pembuatan dan penggandaan dokumen	1,00	PKT	50.000.000	50.000.000	

Sumber: Buku User Manual Aplikasi E-Planning Kementerian Perhubungan

7: Klik untuk menambahkan data persyaratan. Berikut merupakan langkah-langkah untuk menambahkan data persyaratan

Gambar 14. Tabel Data Persyaratan

TABEL DATA PERSYARATAN

Tahun Anggaran: 2019
 Satker: 512802 KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH I
 K/L - Unit: 022.05 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

Program: 022.05.09 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENVELENGGARAAN TRANSPORTASI UDARA
 Kegiatan: 1961 PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA BANDAR UDARA
 Output: 1961.034 PERALATAN PENUNJANG BANDARA
 Usulan: 1961.034.001 PERALATAN PENUNJANG BANDARA

NO	NAMA PERSYARATAN	FILE	KETERANGAN	UPDATE BY
Data tidak ditemukan !				

Sumber: Buku User Manual Aplikasi E-Planning Kementerian Perhubungan

Gambar 15. Tambah Data

TAMBAH DATA

Nama Persyaratan: Pilih Persyaratan (Wajib diisi)
 Status Dokumen: Ada (Wajib diisi)
 Upload dokumen?: Ya (Wajib diisi)

Choose File | No file chosen

Simpan 10 | Reset

Sumber: Buku User Manual Aplikasi E-Planning Kementerian Perhubungan

8 : Klik “Tambah Persyaratan”

9 : Isikan Detail Persyaratan

10 : Klik “Simpan”

Setelah persyaratan selesai diinputkan, gunakan tombol manajemen data untuk melakukan pengelolaan data *output*, sub *output*, komponen, sub komponen maupun data akun. Tombol manajemen data terdiri dari tiga tombol yaitu :

Tombol , digunakan untuk melakukan perubahan data

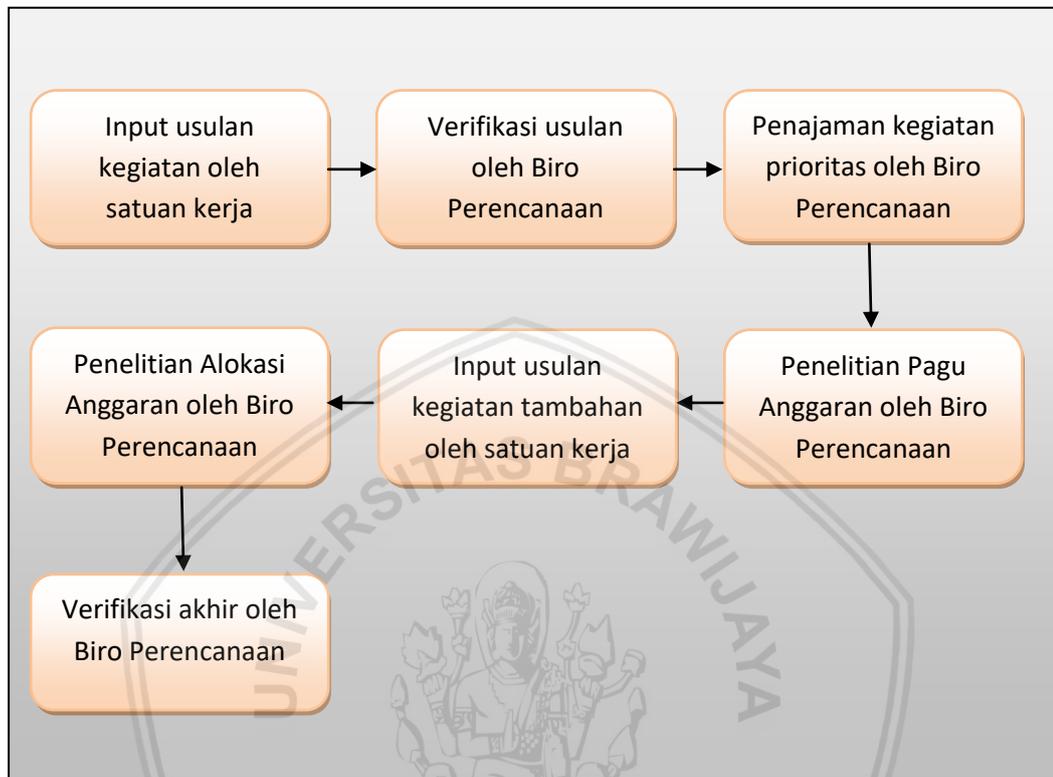
Tombol , digunakan untuk menghapus data

Tombol , digunakan untuk menambahkan detail data

7. Alur Proses Kerja atau Standar Operasional Prosedur (SOP) Aplikasi *E-Planning*

Pengajuan usulan kegiatan dalam aplikasi *e-planning* terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dan prosedur yang harus dilalui oleh para satuan kerja Kementerian Perhubungan. Prosedur yang harus diikuti tertuang dalam buku prosedur aplikasi *e-planning* yang dapat dimiliki oleh para pengguna aplikasi tersebut. Berikut adalah alur proses kerja dari pelaksanaan aplikasi *e-planning* di Kementerian Perhubungan :

Gambar 16. Skema Prosedur Pelaksanaan Aplikasi *E-Planning*



Sumber: Buku Prosedur Aplikasi *E-Planning* Kementerian Perhubungan

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penginputan usulan program atau kegiatan dan data dukung perencanaan oleh satuan kerja (satker) dalam aplikasi *e-planning* dalam penyusunan Pagu Kebutuhan
- b. Pelaksanaan verifikasi usulan oleh Biro Perencanaan dalam pembahasan Pagu Kebutuhan
- c. Penajaman program kegiatan prioritas dalam Pagu Indikatif oleh Biro Perencanaan
- d. Penelitian Pagu Anggaran oleh Biro Perencanaan

- e. Penginputan usulan program/kegiatan tambahan yang merupakan kegiatan “on top” oleh satuan kerja atau UPT khususnya untuk kegiatan Direktif Presiden, Arahan Menhub dan Masukan DPR dalam Raker dan RDP setelah memenuhi persyaratan usulan kegiatan di luar Pagu Kebutuhan sesuai peraturan yang berlaku
- f. Penelitian Alokasi Anggaran oleh Biro Perencanaan
- g. Pelaksanaan verifikasi akhir oleh Biro Perencanaan sebagai dasar input data pada aplikasi RKA-K/L Kementerian Keuangan cq. Dirjen Anggaran dalam penerbitan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran).

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Efektivitas Pelaksanaan Aplikasi *E-Planning* di Kementerian Perhubungan

Kementerian Perhubungan yang disingkat Kemenhub adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan transportasi. Kementerian Perhubungan memiliki tugas sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Untuk mencapai tujuan tersebut Kementerian Perhubungan menggunakan suatu aplikasi *online* yang disebut *e-planning*.

Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk dijelaskan sebagai tolak ukur dalam mengetahui efektivitas pelaksanaan aplikasi *e-*

planning dalam proses perencanaan di Kementerian Perhubungan. Berikut beberapa indikator yang dapat dijadikan sebagai pengukur efektivitas dari pelaksanaan aplikasi tersebut.

a. Ketepatan Sasaran Pelaksanaan Aplikasi *E-Planning*

Pelaksanaan aplikasi *e-planning* di Kementerian Perhubungan tidak lepas dari sasaran yang ingin dicapai oleh Kementerian Perhubungan. Ketepatan pada sasaran yang telah ditetapkan menjadi penting untuk dicapai agar sasaran yang dituju dari pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terarah. Ketepatan sasaran meliputi siapa saja sasaran dari pelaksanaan aplikasi *e-planning* itu sendiri. Berikut merupakan pernyataan dari Ibu Dwi Utami mengenai hal tersebut:

“Sasaran dalam aplikasi *e-planning* ini yaitu satuan kerja (satker) dan direktorat-direktorat di Kementerian Perhubungan, semua merasakan manfaatnya. Karena ini kan dasar mereka untuk melakukan kinerja di tahun berikutnya, jadi semua satker di Kementerian Perhubungan ini bergantung pada aplikasi *e-planning* ini” (Hasil wawancara tanggal 13 Maret 2019 pukul 13.00 WIB di Gedung Cipta Kementerian Perhubungan).

Keaktifan dari para pegawai yang melakukan pelaksanaan aplikasi *e-planning* dinilai baik, karena seluruh satuan kerja di Kementerian Perhubungan sudah aktif dalam menggunakan aplikasi *e-planning* tersebut seperti halnya yang dikemukakan oleh Ibu Jovita Sibarani sebagai berikut:

“Keaktifan para pegawai ya semua aktif karena seluruh satuan kerja Kementerian Perhubungan ini menggunakan aplikasi *e-planning*, berarti sudah bisa dibilang aktif. Jadi, perencanaannya akan seperti apa, kita mau melakukan apa gitu, nah itu nanti diinput ke dalam aplikasi *e-planning* ini” (Hasil wawancara tanggal 14

Maret 2019 pukul 12.00 WIB di Gedung Karya Kementerian Perhubungan).

Hal tersebut juga didukung dengan pernyataan dari Bapak Bintang Anugrah yaitu sebagai berikut:

“Untuk mengetahui keaktifan ya bisa dilihat melalui daftar *user* atau pengguna aplikasi *e-planning*, siapa-siapa saja yang menggunakan atau menginput data dengan baik sesuai usulan yang telah ditetapkan ke dalam aplikasi” (Hasil wawancara tanggal 13 Maret 2019 pukul 13.15 WIB di Gedung Cipta Kementerian Perhubungan).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa keaktifan para pegawai sudah baik yang dapat dilihat melalui daftar *user* (pengguna) aplikasi *e-planning* Kementerian Perhubungan.

b. Sosialisasi Pelaksanaan Aplikasi *E-Planning*

Sosialisasi menjadi penting guna meningkatkan pemahaman kepada para pegawai mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan. Berikut merupakan pernyataan dari Bapak Gede Pasek mengenai sosialisasi dari pelaksanaan aplikasi *e-planning* itu sendiri yaitu sebagai berikut:

“Sosialisasi pelaksanaan aplikasi *e-planning* ini sudah diinfokan tahun lalu waktu pembukaan Pagu Kebutuhan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) 2019 yang dihadiri oleh Ibu Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Bapak Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (KaBappenas) Bambang Brojonegoro, Bapak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menkomaritim) Luhut Binsar Panjaitan, seluruh pejabat tingkat madya (eselon I) Kementerian Perhubungan, seluruh pejabat tingkat pratama (eselon II) Kementerian Perhubungan, serta eselon III Kementerian Perhubungan” (Hasil wawancara tanggal 13 Maret 2019 pukul 13.30 WIB di Gedung Cipta Kementerian Perhubungan).

Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari Bapak Dandun Prakosa saat penelitian melakukan wawancara sebagai berikut:

“Sosialisasinya, yang mengundang seluruh pejabat di Kementerian Perhubungan untuk ikut serta itu kita Biro Perencanaan. Kita sudah *sounding* secara besar-besaran, jadi semua atasan tertinggi di Kementerian Perhubungan sudah terinfokan. Jadi tidak ada alasan lagi bagi seluruh satuan kerja (satker) untuk tidak mengetahui adanya aplikasi *e-planning* ini” (Hasil wawancara tanggal 13 Maret 2019 pukul 13.30 WIB di Gedung Cipta Kementerian Perhubungan).

Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari Bapak Victor Basa saat penelitian melakukan wawancara sebagai berikut:

“Saya melihat banyak kawan-kawan satuan kerja yang menghadiri sosialisasi aplikasi *e-planning* ini, antusiasnya begitu tinggi akan hadirnya aplikasi ini, saya juga datang mewakili unit Direktorat Navigasi Penerbangan” (Hasil wawancara tanggal 14 Maret 2019 pukul 13.00 WIB di Gedung Karya Kementerian Perhubungan).

Pernyataan tersebut di atas menunjukkan bahwa sosialisasi telah dilaksanakan kepada seluruh satuan kerja (satker) terutama seluruh pejabat di Kementerian Perhubungan terkait dengan kegiatan perencanaan yang ada dalam aplikasi *e-planning* itu sendiri. Sosialisasi dilaksanakan pada tahun 2018 pada Pembukaan Pagu Kebutuhan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) 2019 di Ruang Rapat Gedung Karya.

c. Tujuan Pelaksanaan Aplikasi *E-Planning*

Penentuan tujuan menjadi penting guna menetapkan arah dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Seperti halnya pada pelaksanaan aplikasi *e-planning* dimana perumusan tujuan dilaksanakannya aplikasi tersebut

pun perlu dilakukan. Berikut merupakan tujuan dilaksanakannya aplikasi *e-planning* menurut Ibu Dwi Utami yaitu:

“Tujuannya itu meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, sebenarnya tujuan dari pelaksanaan aplikasi *e-planning* ini sendiri sih untuk meningkatkan kualitas RKA Kementerian Perhubungan dan mengurangi fisik (*less paper*) dalam proses pengusulan dan perencanaan RKA pada Kementerian Perhubungan” (Hasil wawancara tanggal 13 Maret 2019 pukul 13.35 WIB di Gedung Cipta Kementerian Perhubungan).

Pelaksanaan aplikasi *e-planning* memiliki tujuan dalam pelaksanaannya dimana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut telah dilakukannya suatu upaya oleh Kementerian Perhubungan. Upaya yang dilakukan agar tujuan tersebut dapat tercapai secara maksimal dalam pelaksanaan aplikasi *e-planning* yaitu dilakukannya pengembangan aplikasi *e-planning* ini sendiri seperti yang dikemukakan oleh Bapak Dandun Prakosa sebagai berikut:

“Upaya untuk mencapai tujuan tersebut, ya aplikasinya dikembangkan. Sebenarnya kita sudah menjalankannya tetapi terhambat oleh aplikasinya sendiri. Aplikasinya masih belum sempurna, masih butuh banyak penyempurnaan. Seiring waktu dalam pelaksanaan aplikasinya, dilakukan penyempurnaan, nah yang kurang itu disempurnakan” (Hasil wawancara tanggal 13 Maret 2019 pukul 13.40 WIB di Gedung Cipta Kementerian Perhubungan).

Hal tersebut juga dikemukakan oleh Bapak Bintang Anugrah saat peneliti melakukan wawancara yaitu sebagai berikut:

“Pengembangan aplikasi dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas sebagai tujuan dari pelaksanaan aplikasi ini. Masih banyak penyempurnaan yang dibutuhkan di aplikasi ini. Kita punya aplikasi agar kita kerja cepat kan intinya untuk mempermudah kita kan, tapi malah kerja jadi lebih memakan waktu lama” (Hasil wawancara tanggal 13 Maret 2019 pukul 13.50 WIB di Gedung Cipta Kementerian Perhubungan).

Selain itu, terdapat upaya lain yang dikemukakan oleh Ibrahim sebagai berikut:

“Upayanya merubah kebiasaan yang dulu dilakukan pertemuan langsung dengan para satuan kerja, nah disini kita harus mau menerima datangnya teknologi baru dan di era yang sekarang ini kan semuanya serba elektronik, jadi kita harus menyikapinya dengan positif, pegawai di Kementerian Perhubungan harus siap menerima perubahan yang ada, karena pada kenyataannya tidak seluruh pegawai dapat menerima kehadiran aplikasi *e-planning* ini” (Hasil wawancara tanggal 14 Maret 2019 pukul 13.30 WIB di Gedung Karya Kementerian Perhubungan).

Jika suatu upaya dilakukan tentunya akan menghasilkan suatu *output*. Seperti halnya pada pelaksanaan aplikasi *e-planning* ini dimana *output* merupakan hasil dari pelaksanaan upaya untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan aplikasi *e-planning* itu sendiri. Berikut merupakan pernyataan dari Bapak Gede Pasek mengenai *output* dari pelaksanaan aplikasi *e-planning* yaitu:

“Sejauh ini *output* dari pelaksanaan aplikasi *e-planning* ini yaitu dilihat dari produk DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang berkualitas dan *zero blockir*. *Zero blockir* itu seperti kita sudah menganggarkan tapi tidak terlaksana, contohnya mau bangun bandara udah disiapin ToR/KAK (*Term of Reference* / Kerangka Acuan Kerja) dan RAB (Rencana Anggaran Biaya), tau-tau lahannya gaada. Anggaran udah keluar nih cuma gabisa dibangun karena lahannya bukan punya kita. Nah itu kan harus ada di kelengkapan. Disitulah peran dari biro perencanaan masuk, jadi ketika kita menemukan adanya suatu kekurangan dari persyaratan yang seharusnya ada, misalnya seperti contoh di atas yang lahannya tidak ada, kayak sertifikat berarti kan harus ada *copy*-nya, kita akan memberhentikan usulan kegiatan tersebut, baru blokir” (Hasil wawancara tanggal 13 Maret 2019 pukul 14.00 WIB di Gedung Cipta Kementerian Perhubungan).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa *output* dari pelaksanaan aplikasi *e-planning* ini adalah DIPA (Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaran) dan *zero blockir* atau memberhentikan usulan suatu kegiatan pembangunan apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

d. Pemantauan Pelaksanaan Aplikasi *E-Planning*

Pemantauan diperlukan guna mengetahui tingkat keberhasilan maupun perkembangan dari suatu kebijakan yang dibuat. Hal ini juga berlaku dalam pelaksanaan aplikasi *e-planning* itu sendiri, pemantauan diperlukan guna mengetahui tingkat keberhasilan serta perkembangan dari pelaksanaan aplikasi *e-planning* terhadap peningkatan kualitas DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) di Kementerian Perhubungan. Berikut adalah hasil wawancara dengan Ibu Jovita Sibarani mengenai pemantauan dari pelaksanaan aplikasi *e-planning*:

“Pemantauannya dari atasan, diawasi terus sih seperti Kepala Bagian, Pak Karo (Kepala Biro) atau Direktur yang mengawasi pelaksanaannya apakah memang benar terlaksana ngga nih atau memang aplikasinya ngga digunakan” (Hasil wawancara tanggal 14 Maret 2019 pukul 14.00 WIB di Gedung Karya Kementerian Perhubungan).

Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan dari Bapak Ibrahim saat peneliti melakukan wawancara yaitu sebagai berikut:

“Atasan yang melakukan pemantauan, jika dilihat dari segi pemantauannya sudah baik karena atasan selalu bertanya atau mengawasi seperti apa pelaksanaan aplikasi ini berjalan” (Hasil wawancara tanggal 14 Maret 2019 pukul 14.10 WIB di Gedung Karya Kementerian Perhubungan).

Sedangkan pernyataan dari Bapak Bintang Anugrah mengenai pemantauan pelaksanaan dari aplikasi *e-planning* tersebut adalah sebagai berikut:

“Sebenarnya, dengan kita mengakses aplikasi *e-planning* ini sudah termasuk melakukan suatu pemantauan. Di *e-planning* itu kita juga ada *monitoring* kegiatan rencana kerja anggaran yang diusulkan oleh seluruh satuan kerja di Kementerian Perhubungan. Jadi, disitu kita juga melakukan pemantauan” (Hasil wawancara tanggal 13 Maret 2019 pukul 14.10 WIB di Gedung Cipta Kementerian Perhubungan).

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa pemantauan yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan terhadap perkembangan dari hasil pelaksanaan aplikasi *e-planning* ini dapat dikatakan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan Bapak dan Ibu yang telah dipaparkan di atas yang menyebutkan bahwa pemantauan telah dilakukan dari atasan yaitu atau Kepala Bagian, Kepala Biro, atau Direktur itu sendiri serta pemantauan dari pegawai Kementerian Perhubungan yang secara tidak langsung dengan mengakses aplikasi tersebut maka sudah termasuk ke dalam proses pemantauan seperti apakah usulan-usulan kegiatan yang diusulkan oleh satuan kerja di Kementerian Perhubungan.

2. Faktor yang Mendukung dan Menghambat Pelaksanaan Aplikasi *E-Planning* di Kementerian Perhubungan

a. Faktor Pendukung

Dalam pelaksanaan aplikasi *e-planning* tentunya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kelancaran dari pelaksanaan aplikasi tersebut. Berikut merupakan beberapa faktor pendukung dari pelaksanaan aplikasi *e-planning* yang ditemui oleh pegawai Kementerian Perhubungan, yaitu sebagai berikut:

1) Antusiasme Pegawai dalam Menerima Aplikasi *E-Planning* di Kementerian Perhubungan

Para pegawai Kementerian Perhubungan sangat menyambut baik dalam pelaksanaan aplikasi *e-planning* dikarenakan dengan aplikasi ini mereka dapat dengan mudah menyusun rencana kerja dan anggaran pada proses perencanaan di Kementerian Perhubungan. Antusiasme pegawai untuk mengikuti pelaksanaan sosialisasi dengan aplikasi ini pun juga dapat terlihat dari keikutsertaan mereka saat dilakukannya rapat koordinasi terkait *e-planning*. Hal tersebut didukung dengan pernyataan dari Ibu Dwi Utami saat peneliti melakukan wawancara sebagai berikut:

“Antusiasme para pegawai bisa dilihat dari kehadiran mereka saat pelaksanaan sosialisasi sekaligus rapat koordinasi terkait aplikasi *e-planning* yang akan memudahkan mereka dalam proses perencanaan yang menyusun rencana kerja dan anggaran melalui aplikasi ini” (Hasil wawancara tanggal 13 Maret 2019 pukul 14.10 WIB di Gedung Cipta Kementerian Perhubungan).

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa antusiasme dari pegawai Kementerian Perhubungan menjadi salah satu faktor pendukung dari dilaksanakannya aplikasi ini. Hal tersebut dikarenakan jika tanpa adanya keaktifan atau antusiasme pegawai dalam pelaksanaan aplikasi *e-planning*, maka pelaksanaannya tidak dapat dijalankan dengan baik.

2) Dukungan dari Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Perhubungan

Adanya dukungan dari salah satu satuan kerja yang menciptakan aplikasi *e-planning* yaitu Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Perhubungan atau disingkat dengan Pustikom. Dukungan tersebut sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai Kementerian Perhubungan dalam mengakses aplikasi *e-planning*. Hal itu diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Dandun Prakosa saat peneliti melakukan wawancara sebagai berikut:

“Pelaksanaan aplikasi *e-planning* ini didukung oleh satuan kerja (satker) yang menciptakan aplikasi tersebut yaitu Pustikom Kementerian Perhubungan. Jadi, mereka mendukung kita untuk memiliki kewenangan dalam mengakses aplikasi ini” (Hasil wawancara tanggal 13 Maret 2019 pukul 14.30 WIB di Gedung Cipta Kementerian Perhubungan).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dukungan dari pencipta aplikasi *e-planning* yaitu Pustikom Kementerian Perhubungan tentunya menjadi salah satu faktor pendukung yang baik untuk pelaksanaan aplikasi *e-planning*. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya dukungan dari Pustikom Kementerian Perhubungan mengenai pelaksanaan aplikasi *e-planning* diharapkan mampu meningkatkan kinerja para pegawai dalam pelaksanaan aplikasi ini.

b. Faktor Penghambat

Poin di atas telah dikemukakan beberapa faktor pendukung yang ditemukan oleh pegawai Kementerian Perhubungan dalam pelaksanaan

aplikasi *e-planning*. Selain faktor pendukung, ditemukan beberapa faktor penghambat yang menjadi kendala bagi pegawai untuk melaksanakan aplikasi *e-planning*. Berikut merupakan beberapa faktor penghambat atau kendala yang dialami oleh pegawai dalam melaksanakan aplikasi *e-planning*, yaitu sebagai berikut:

1) Rincian Usulan Kegiatan dari Satuan Kerja Kurang Jelas

Salah satu faktor penghambat yang dialami dalam pelaksanaan aplikasi *e-planning* yaitu rincian usulan kegiatan dari satuan kerja yang kurang jelas. Kondisi tersebut didukung oleh pernyataan dari Ibu Jovita Sibarani mengenai hal ini sebagai berikut:

“Pihak Biro Perencanaan itu kan cuma tau dari dokumen. Pada awalnya sebelum adanya *e-planning*, kita bertemu langsung dengan pihak Biroren yang mengusulkan kegiatan tersebut, kita sendiri yang menjelaskan apa yang menjadi kebutuhan kita atau permasalahan pada satker kita masing-masing. Kalau sekarang setelah adanya *e-planning*, kita itu kan ga ketemu nih jadi pihak Biroren hanya melihat di aplikasi aja misal oh orang ini mau memperluas terminal, emangnya kenapa ini masalahnya apa terminalnya, sehingga rincian usulan kegiatannya mungkin kurang bisa dipahami oleh mereka” (Hasil wawancara tanggal 14 Maret 2019 pukul 14.35 WIB di Gedung Karya Kementerian Perhubungan).

Hal tersebut juga didukung dengan pernyataan dari Ibu Dwi

Utami saat peneliti melakukan wawancara sebagai berikut:

“Kalau tatap muka kan bisa ya nanya langsung emang keperluanmu apa. Sebenarnya yang menjadi lawan yang menjawab itu ada, yaitu direktorat, kan sebelumnya udah ngelakuin rapat koordinasi antara satuan satu sama ini, tapi yang paling mendasar dan paling mengerti itu kan sebenarnya satkernya sendiri. Yaudah jadi intinya sih kita tidak bisa mengerti dengan baik apa saja kebutuhan si satker, apa saja kegiatannya. Karena perencanaan itu kan membahas, nah kita harus tau persis apa yang kita rencanakan, tapi yang kita tanya

ini bukan orang yang merencanakan, melainkan si tangan kedua” (Hasil wawancara tanggal 13 Maret 2019 pukul 14.40 WIB di Gedung Cipta Kementerian Perhubungan).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa rincian usulan kegiatan dari satuan kerja yang kurang jelas tentunya menjadi salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan aplikasi *e-planning* ini.

2) Aplikasi Tidak Dapat Melakukan Rekapitulasi Data dengan Baik

Faktor penghambat berikutnya yaitu aplikasi tidak dapat melakukan rekapitulasi dengan baik. Kondisi tersebut didukung oleh pernyataan dari Bapak Bintang Anugrah mengenai hal ini sebagai berikut:

“Aplikasi tidak merekap dengan baik, jadi nanti rekapannya itu kita pindahkan dulu dari aplikasi *e-planning* secara manual dan mengerjakan sendiri di *Microsoft Excel*” (Hasil wawancara tanggal 13 Maret 2019 pukul 15.00 WIB di Gedung Cipta Kementerian Perhubungan).

Hal tersebut juga didukung dengan pernyataan dari Ibu Dwi Utami saat peneliti melakukan wawancara sebagai berikut:

“Masih belum bisa menyimpulkan berapa total blokir dari hasil verifikasi yang kita lakukan terhadap usulan-usulan satuan kerja. Jadi kita tidak bisa melihat rekapannya, rekapannya tidak muncul, mana saja dari semua total anggaran, dimisalkan eselon 1 si laut itu berapa sih yang data dukungnya tidak lengkap atau yang masih bermasalah, berapa sih total anggarannya sehingga harus menghitung secara manual lagi. Nah disitu bagaimana cara kita menanggulangi hal itu untuk melihat blokir dan tidak blokirnya itu kita menyasati dengan mengisi secara manual di program *Microsoft Excel*. Jadi semua kegiatan-kegiatan yang kita tandai itu nanti kita masukan lagi ke *Microsoft Excel* dan disitu kita

total” (Hasil wawancara tanggal 13 Maret 2019 pukul 15.15 WIB di Gedung Cipta Kementerian Perhubungan).

Berdasarkan informasi di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan aplikasi *e-planning* Kementerian Perhubungan ini mengalami hambatan. Hambatan dalam pelaksanaan aplikasi *e-planning* ini adalah aplikasi yang tidak dapat melakukan rekapitulasi dengan baik, sehingga harus dipindahkan terlebih dahulu ke *Microsoft Excel* secara manual.

C. Analisis Data dan Pembahasan

Pelaksanaan perencanaan pembangunan bagi Indonesia merupakan salah satu jalan yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Tidak hanya pembangunan dari fisiknya saja melainkan juga dari non fisiknya yaitu dari Sumber Daya Manusia (SDM) nya sendiri. Perencanaan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumber daya yang tersedia (Anggara dan Sumantri, 2016:87). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwasanya pihak Kementerian Perhubungan dapat merumuskan kegiatan pembangunan secara efisien dan efektif melalui perencanaan sehingga dapat memberikan hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada.

Kegiatan perencanaan di Kementerian Perhubungan dilakukan melalui sebuah aplikasi yang berbasis komputer dan diakses secara *online* yaitu aplikasi *e-planning*. Aplikasi tersebut dapat memudahkan proses pengajuan

usulan kegiatan dan anggaran, memudahkan proses analisa verifikasi usulan kegiatan dan anggaran, serta memberikan informasi yang cepat dan *real-time* pada setiap pembahasan rencana kegiatan dan alokasi anggaran. Namun seiring berjalannya pelaksanaan aplikasi *e-planning*, masih terdapat suatu hambatan yang meliputi rincian usulan kegiatan dari satuan kerja yang masih dirasa kurang jelas dalam penyampaiannya serta aplikasi itu sendiri yang tidak dapat melakukan rekapitulasi data dengan baik. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ada yaitu dilakukannya pembenahan aplikasi dan penyesuaian antar *user* dengan aplikasi *e-planning*.

1. Efektivitas Pelaksanaan Aplikasi *E-Planning* dalam Proses Perencanaan di Kementerian Perhubungan

Untuk mengetahui apakah aplikasi *e-planning* telah berjalan secara efektif diperlukannya suatu pengukuran. Pengukuran tersebut membutuhkan beberapa aspek yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur atau indikator dari tingkat keefektifan pelaksanaan aplikasi tersebut. Pada penelitian ini peneliti menggunakan aspek atau indikator efektivitas dari Budiani (2007:53) yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur efektivitas dari pelaksanaan aplikasi *e-planning* yaitu sebagai berikut:

- a. Ketepatan sasaran pelaksanaan aplikasi *e-planning*, yaitu sejauh mana pegawai Kementerian Perhubungan tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya
- b. Sosialisasi pelaksanaan aplikasi *e-planning*, yaitu kemampuan pembuat aplikasi dalam melakukan sosialisasi sehingga informasi mengenai

pelaksanaan aplikasi tersampaikan kepada seluruh satuan kerja Kementerian Perhubungan.

- c. Tujuan pelaksanaan aplikasi *e-planning*, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan aplikasi dengan tujuan aplikasi yang telah ditetapkan sebelumnya
- d. Pemantauan pelaksanaan aplikasi *e-planning*, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dijalankannya aplikasi tersebut sebagai bentuk pengawasan kepada pengguna aplikasi.

Berikut adalah penjelasan mengenai keempat indikator tersebut sesuai dengan data yang diperoleh peneliti dari lapangan.

a. Ketepatan Sasaran Pelaksanaan Aplikasi *E-Planning*

Salah satu aspek atau indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui efektif atau tidaknya pelaksanaan aplikasi *e-planning* ini yaitu ketepatan dalam pencapaian sasaran. Sasaran merupakan suatu target yang ingin dicapai dengan suatu usaha yang dilakukan. Dari pencapaian sasaran dapat dinilai bahwa suatu kegiatan tersebut dapat dikatakan berhasil atau tidak. Sasaran dari pelaksanaan aplikasi *e-planning* ini yaitu satuan kerja (satker) atau direktorat-direktorat di Kementerian Perhubungan. Hal tersebut dikarenakan satuan kerja (satker) atau direktorat-direktorat di Kementerian Perhubungan merupakan elemen berpengaruh dalam pelaksanaan aplikasi *e-planning* yang merupakan aplikasi lingkup internal saja.

Sejauh ini ketepatan sasaran dari pelaksanaan aplikasi *e-planning* ini sudah baik. Hal tersebut dapat dilihat dari aktifnya seluruh satuan kerja di Kementerian Perhubungan dalam mengakses aplikasi *e-planning* seperti halnya dalam penginputan data-data usulan. Mereka mengusulkan seperti apa pembangunan infrastruktur transportasi yang akan dirumuskan dan dibangun, dimana setelah itu usulan tersebut diinput ke dalam aplikasi *e-planning*. Selain itu keaktifan pegawai Kementerian Perhubungan dapat dilihat melalui daftar *user* atau pengguna aplikasi *e-planning* yang menggunakan atau menginput data dengan baik sesuai usulan yang telah ditetapkan ke dalam aplikasi.

b. Sosialisasi Pelaksanaan Aplikasi *E-Planning*

Sosialisasi merupakan salah satu proses mengkomunikasikan suatu informasi kepada banyak individu secara umum. Sosialisasi dapat dilihat sebagai upaya untuk memperkenalkan atau menyebarkan mengenai suatu informasi, dimana sosialisasi ini sendiri merupakan kemampuan dari penyelenggara untuk menginfokan informasi tersebut terhadap yang bersangkutan dari sasaran program tersebut. Dengan adanya sosialisasi ini akan dapat diketahui mengenai pelaksanaan dari program tersebut. Pada indikator efektivitas menurut Budiani (2007:53), pelaksanaan sosialisasi menjadi salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat efektivitas dari suatu program.

Hal tersebut juga berlaku pada pelaksanaan aplikasi *e-planning* dimana sosialisasi menjadi penting untuk dilaksanakan agar pegawai

Kementerian Perhubungan dapat dengan mudah mengetahui serta memahami program yang sedang dilaksanakan. Dengan begitu pegawai Kementerian Perhubungan diharapkan mampu secara aktif untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan aplikasi *e-planning* itu sendiri. Menurut informan yang telah diwawancarai oleh peneliti, sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak Kementerian Perhubungan yaitu seputar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan aplikasi *e-planning*. Sosialisasi ini dinilai baik karena sosialisasi yang dilaksanakan tahun lalu dalam acara Pembukaan Pagu Kebutuhan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) 2019 yang membahas aplikasi *e-planning* tersebut mengundang seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Perhubungan dan seluruh satuan kerja dapat hadir sehingga seluruh satuan kerja di Kementerian Perhubungan sudah terinfokan dan tentunya mengetahui adanya aplikasi *e-planning* ini.

c. Tujuan Pelaksanaan Aplikasi *E-Planning*

Penetapan tujuan menjadi penting agar arah dari suatu kegiatan itu sendiri dapat terarah dan tidak meluas. Penetapan hasil juga tidak dapat diwujudkan dengan mudah tanpa adanya penetapan tujuan. Tujuan tidak hanya dirumuskan saja melainkan juga harus ada suatu upaya yang dilakukan agar tercapainya hasil yang diharapkan sesuai tujuan yang telah dirumuskan. Pada indikator efektivitas menurut Budiani (2007:53), tujuan menjadi salah satu indikator dalam melihat efektivitas

suatu program atau kegiatan. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu upaya. Upaya itu yang nantinya akan dibandingkan dengan *output* yang dihasilkan sehingga dapat diketahui seberapa besar tujuan tersebut dapat dicapai.

Seperti halnya pada pelaksanaan aplikasi *e-planning* itu sendiri dimana dalam pelaksanaan aplikasi ini tentunya terdapat suatu tujuan yang telah dirumuskan. Terdapat 2 (dua) tujuan dari pelaksanaan aplikasi *e-planning* yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas (efisiensi, efektivitas, transparansi) RKA Kementerian Perhubungan
2. Mengurangi fisik (*less paper*) dalam proses pengusulan dan perencanaan RKA pada Kementerian Perhubungan

Suatu upaya telah dilaksanakan guna mencapai tujuan tersebut seperti halnya pengembangan aplikasi itu sendiri, penyempurnaan aplikasi yang dilihat dari kekurangan aplikasi tersebut. Selain itu, adanya transisi yaitu melakukan perubahan kebiasaan dari sebelum adanya aplikasi *e-planning* dilakukan pertemuan langsung dengan para satuan kerja yang menghasilkan data berbentuk fisik (*paper*) hingga saat ini harus menerima datangnya teknologi baru yang serba *online* yang menyimpan data dalam bentuk aplikasi *online* seperti halnya pelaksanaan aplikasi *e-planning* ini. Pegawai Kementerian Perhubungan harus siap untuk menerima perubahan yang ada. Namun, respon dari pegawai Kementerian Perhubungan kurang baik, mereka

kurang menyikapi hal ini dengan positif karena kebiasaan lama yang masih tertanam yaitu melakukan tatap muka dalam setiap pengusulan kegiatan. Untuk itu dimulai dengan merubah kebiasaan terlebih dahulu. Diharapkan dengan adanya upaya tersebut dapat mencapai tujuan dari pelaksanaan *e-planning* yang telah dijelaskan sebelumnya yang nantinya akan menghasilkan *output* yaitu DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang berkualitas.

d. Pemantauan Pelaksanaan Aplikasi *E-Planning*

Pemantauan atau pengawasan merupakan salah satu hal yang tidak dapat terpisahkan dengan tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu program atau kegiatan. Adanya pemantauan sangat berguna untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi serta untuk mengetahui tingkat perkembangan dari pelaksanaan suatu program atau kegiatan. Maka dari itu tingkat pemantauan yang dilakukan juga menjadi aspek penting untuk mengetahui efektif atau tidaknya suatu kegiatan tersebut. Menurut Budiani (2007:53) salah satu aspek penting dalam mengetahui efektif atau tidaknya suatu kegiatan yaitu dengan adanya pemantauan, yang mana pemantauan yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya suatu program atau kegiatan sebagai bentuk perhatian kepada individu-individu yang bersangkutan. Seperti halnya pada pelaksanaan aplikasi *e-planning* ini, pemantauan juga menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan untuk mengetahui tingkat keefektifan dari pelaksanaan aplikasi tersebut.

Pemantauan dari pelaksanaan aplikasi *e-planning* ini dapat dikatakan sudah maksimal. Hal tersebut dikarenakan pengawasan secara intensif sudah dilakukan oleh Kepala Bagian, Kepala Biro, Direktur dalam memantau perkembangan atau tingkat keberhasilan dari pelaksanaan aplikasi *e-planning*. Pemantauan tersebut dilakukan ketika jam kerja dengan cara pengecekan ke Ruang Kerja para satuan kerja serta Ruang Kerja Bagian Program dan bertanya ke setiap *user* mengenai sejauh mana aplikasi tersebut berfungsi dan bagaimana aplikasi tersebut digunakan. Selain itu, pemantauan juga dilakukan oleh *user* atau pengguna aplikasi itu sendiri seperti halnya mengakses aplikasi tersebut yang sudah termasuk melakukan suatu pemantauan. Hal tersebut dikarenakan mereka melakukan *monitoring* kegiatan rencana kerja dan anggaran yang diusulkan oleh seluruh satuan kerja Kementerian Perhubungan. Pemantauan sangat diperlukan dalam hal ini guna mengetahui seberapa jauh perkembangan pelaksanaan aplikasi ini dari waktu ke waktu. Pemantauan atau pengawasan juga berguna untuk menentukan langkah selanjutnya apabila ditemui adanya kekurangan atau kesalahan yang terjadi saat pelaksanaan aplikasi.

2. Faktor yang Mendukung dan Menghambat Pelaksanaan Aplikasi *E-Planning* di Kementerian Perhubungan

a. Faktor Pendukung

1) Antusiasme Pegawai dalam Menerima Aplikasi *E-Planning* di Kementerian Perhubungan

Pelaksanaan suatu program atau kegiatan tidak akan berjalan secara lancar tanpa adanya partisipasi dari individu-individu yang bersangkutan. Partisipasi tersebut yang nantinya akan menjadi salah satu faktor pendukung untuk keberlanjutan pelaksanaan kegiatan tersebut. Begitu pula dengan pelaksanaan dari aplikasi *e-planning* yang mana sangat dibutuhkannya partisipasi dari seluruh satuan kerja (satker) Kementerian Perhubungan selaku sumber daya manusia dari pelaksanaan aplikasi *e-planning*. Antusiasme seluruh satuan kerja (satker) Kementerian Perhubungan dalam mengikuti pelaksanaan aplikasi *e-planning* menjadi salah satu bentuk partisipasi dari mereka.

Antusiasme tersebut terlihat dari keaktifan mereka dalam mengikuti acara sosialisasi sekaligus rapat koordinasi yang telah dilaksanakan pada 1 Februari 2018. Keseluruhan dari satuan kerja yang hadir telah menunjukkan antusiasmenya mengenai pelaksanaan aplikasi ini. Antusiasme tersebut menjadi salah satu faktor pendukung yang positif, hal tersebut dikarenakan dengan dimilikinya antusiasme pegawai terhadap pelaksanaan aplikasi ini diharapkan

mereka mampu dengan mudah mencapai tujuan-tujuan yang telah dirumuskan dan ditetapkan.

2) Dukungan dari Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Perhubungan

Adanya dukungan dari Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Perhubungan yang disingkat Pustikom menjadi salah satu faktor yang mendukung jalannya pelaksanaan aplikasi *e-planning* dalam proses perencanaan di Kementerian Perhubungan. Dukungan dari Pustikom ini membuat para pegawai Kementerian Perhubungan memiliki semangat yang tinggi. Hal tersebut dikarenakan dukungan dari pihak Pustikom sebagai pencipta aplikasi yang membuat para *user* merasa memiliki kewenangan dalam mengakses aplikasi *e-planning*. Dengan begitu diharapkan mampu meningkatkan kinerja para pegawai dalam pelaksanaan aplikasi ini.

b. Faktor Penghambat

1) Rincian Usulan Kegiatan dari Satuan Kerja Kurang Jelas

Perencanaan dapat dikatakan baik apabila memiliki rincian usulan kegiatan yang jelas. Kementerian Perhubungan sudah memiliki aplikasi *e-planning* dalam melakukan proses perencanaannya, yang mana setiap satuan kerja diharuskan untuk menginput rincian usulan kegiatan ke dalam aplikasi tersebut. Namun dalam pelaksanaannya, setiap satuan kerja yang

mengusulkan rincian kegiatan dinilai kurang jelas dikarenakan pada saat ini suatu pengusulan dilakukan secara *online* melalui aplikasi *e-planning* sehingga membuat suatu perencanaan menjadi kurang optimal. Hal tersebut dikarenakan dengan menggunakan sistem *online* melalui aplikasi *e-planning* di Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan ini tidak dapat mengetahui secara rinci bagaimana usulan kegiatan yang diinput setiap satuan kerja.

Dengan adanya aplikasi *e-planning* yang mana dalam menginput usulan kegiatan cukup menghambat jalannya pelaksanaan aplikasi tersebut karena tidak adanya tatap muka atau koordinasi secara langsung dalam menginput usulan-usulan tersebut yang dilakukan antar Biro Perencanaan dan satuan kerja. Hal tersebut menyebabkan pihak Biro Perencanaan menjadi sulit memahami apa kegiatan yang diinginkan oleh satuan kerja dari usulan yang diinput melalui aplikasi *e-planning*.

2) Aplikasi Tidak Dapat Melakukan Rekapitulasi Data dengan Baik

Dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan yang menggunakan prinsip *e-government* tentunya sangat memudahkan seluruh pegawai dalam menjalankan kegiatan pemerintahan. Akan tetapi, pihak Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan dengan *e-government* melalui aplikasi *e-planning* masih ditemukannya para pegawai yang mengeluh

mengenai aplikasi yang tidak dapat melakukan rekapitulasi data dengan baik.

Pada penggunaan aplikasi *e-planning* yang mana jumlah usulan kegiatan yang terinput ke dalam aplikasi terhitung cukup banyak. Namun, aplikasi *e-planning* memiliki hambatan dalam penggunaannya yang mana salah satu fungsi sistem yang seharusnya yaitu dapat merekapitulasi seluruh jumlah data yang masuk. Tentunya hal itu membuat beban kerja pegawai menjadi berkurang, akan tetapi berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, aplikasi *e-planning* dalam merekap jumlah data yang masuk belum berfungsi dengan baik. Hal itu menyebabkan tugas dari pegawai menjadi bertambah dengan harus melakukan rekapitulasi data secara manual di program *Microsoft Excel* agar total anggaran dapat terbaca sehingga kegiatan perencanaan dapat berjalan dengan baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai efektivitas pelaksanaan aplikasi *e-planning* di Kementerian Perhubungan, dapat ditarik menjadi beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan aplikasi *e-planning* oleh Kementerian Perhubungan dalam menjalankan proses atau kegiatan terkait data-data yang ada di *e-planning* dapat dikatakan belum efektif, dimana dapat dilihat pada upaya yang seharusnya dilakukan untuk mencapai tujuan dari dilaksanakannya aplikasi *e-planning* belum dilakukan secara maksimal yaitu merubah kebiasaan lama yang awalnya menyimpan file-file di dokumen dalam bentuk fisik (*paper*) ke penyimpanan dalam bentuk aplikasi *online*, sehingga membuat pelaksanaan aplikasi *e-planning* di Kementerian Perhubungan dikatakan belum efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil fokus penelitian yang mana dari empat indikator terdapat satu indikator yang belum dilaksanakan secara maksimal. Berikut adalah penjelasannya:

- a. Ketepatan sasaran

Ketepatan sasaran dari pelaksanaan aplikasi *e-planning* ini telah mencapai sasaran yang mana pegawai Kementerian Perhubungan sudah lebih aktif dalam menggunakan aplikasi tersebut.

b. Sosialisasi

Sosialisasi telah dilakukan dan seluruh satuan kerja Kementerian Perhubungan hadir dalam sosialisasi tersebut sehingga tidak ada alasan bagi satuan kerja untuk tidak mengetahui adanya aplikasi *e-planning* di Kementerian Perhubungan.

c. Tujuan

Terdapat 2 (dua) tujuan dalam pelaksanaan aplikasi *e-planning* yang mana dari kedua tujuan tersebut telah disertai dengan upaya dari pihak Kementerian Perhubungan itu sendiri untuk mencapai tujuan tersebut. Tetapi upaya tersebut masih belum dilaksanakan secara maksimal salah satunya yaitu merubah kebiasaan lama yang awalnya menyimpan file-file di dokumen dalam bentuk fisik (*paper*) ke penyimpanan dalam bentuk aplikasi *online*.

d. Pemantauan

Pemantauan sudah dilakukan secara rutin dan berkala oleh Kepala Bagian, Kepala Biro, ataupun Direktur di Kementerian Perhubungan dengan cara melihat sejauh manakah aplikasi tersebut digunakan, apakah disalahgunakan atau tidak. Selain itu, *user* aplikasi *e-planning* sendiri juga melakukan *monitoring* dalam aplikasi tersebut mengenai seperti apakah usulan-usulan yang telah disampaikan masing-masing satuan kerja.

2. Faktor pendukung dari pelaksanaan aplikasi *e-planning* ini yaitu antusiasme pegawai dalam menerima aplikasi *e-planning* di Kementerian

Perhubungan, kemudian didukung dengan adanya dukungan dari Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Perhubungan.

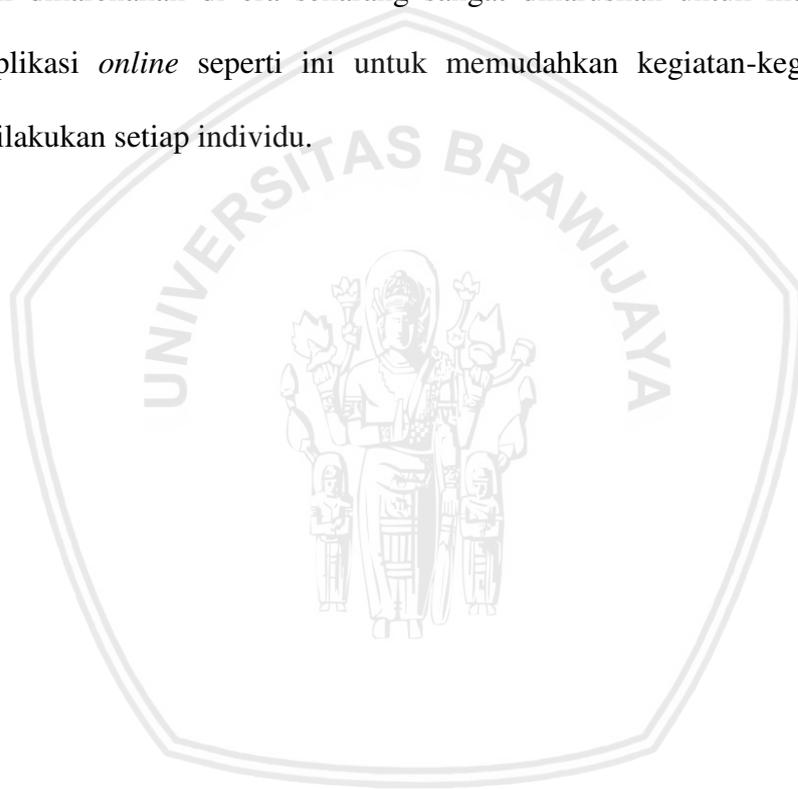
3. Faktor penghambat dari pelaksanaan aplikasi *e-planning* ini yaitu rincian usulan kegiatan dari satuan kerja yang kurang jelas, kemudian aplikasi tidak dapat melakukan rekapitulasi data dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dirumuskan di dalam kesimpulan di atas, maka peneliti mengajukan beberapa saran yang mungkin dapat membantu dalam memaksimalkan pelaksanaan aplikasi *e-planning* ini. Berikut beberapa saran yang diajukan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan aplikasi *e-planning* ini peneliti memberikan saran agar setiap satuan kerja diwajibkan mengirim data usulan kegiatan secara jelas sehingga *user* atau pengguna aplikasi *e-planning* dapat memahami apa dan bagaimana usulan kegiatan yang direncanakan dan dibutuhkan satuan kerja tersebut.
2. Seiring dengan pengembangan aplikasi dan penyesuaian antar *user* dengan aplikasi *e-planning* di Kementerian Perhubungan, peneliti memberikan saran agar dilakukannya pembenahan aplikasi oleh Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pustikom) Kementerian Perhubungan sebagai pencipta aplikasi *e-planning*, hal itu dilakukan agar rekapitulasi data tidak dikerjakan secara manual lagi sehingga proses rekapitulasi data dapat berjalan dengan baik.

3. Pencapaian tujuan dari pelaksanaan *e-planning* membutuhkan upaya yang jelas dan terarah. Peneliti memberikan saran kepada pihak Kementerian Perhubungan untuk mengadakan sosialisasi yang diadakan secara rutin terkait *e-planning* agar pegawai yang belum memiliki respon positif terhadap *e-planning* menjadi terbiasa akan adanya aplikasi tersebut. Hal ini dikarenakan di era sekarang sangat diharuskan untuk menggunakan aplikasi *online* seperti ini untuk memudahkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan setiap individu.



DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Akadun. 2009. *Teknologi Informasi Administrasi*. Bandung: CV Alfabeta
- Anggara, Sahya dan Sumantri. 2016. *Administrasi Pembangunan: Teori dan Praktik*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Arifianti, Ria. 2010. *Peranan Sistem Informasi Manajemen dalam Pengambilan Keputusan Seorang Manajer*. Jurnal Express Ariyanti. Hal.: 1-12
- Arifin, Zainal. 2011. *Evaluasi Pembelajaran Prinsip, Teknik, Prosedur*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta: Rineka Cipta
- Bastian. 2003. *Perkembangan "E-government" di Indonesia*. Jakarta: PT. Sinar Harapan Persada
- Bisnis, Kumparan. 2018. *Menhub Ingin Alokasi Anggaran Lebih Baik Lewat Aplikasi Online*. Diakses 29 Januari 2019. <https://kumparan.com>
- Budiani, Ni Wayan. 2007. *Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar*. Jurnal Ekonomi dan Sosial INPUT. Volume 2 No. 1. Desember: 49-57
- Bungin, Burhan. 2007. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Creswell, John W. 2016. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Gordon, Davis B. 2002. *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen Bagian I Pengantar*. Jakarta: PPM
- Habibullah, Achmad. 2010. *Kajian Pemanfaatan dan Pengembangan E-Government*. Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik. Vol. 23 No. 3. Hal.: 187-195
- Hasibuan, Malayu S.P. 2011. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

- Halim, Abdul dan Muhammad Iqbal. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Hidayat. 2006. *Teori Efektivitas Dalam Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Indrajit, Richardus Eko. 2002. *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi.
- Instruksi Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2019 Melalui Aplikasi *E-Planning*
- Instruksi Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kelengkapan Data Dukung Minimum Usulan Kegiatan Pagu Kebutuhan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan Tahun 2019
- Instruksi Presiden Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil. 2002. *Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Telematika Provinsi Jawa Timur
- Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 336 Tahun 2018 tentang Reviu Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019
- Kompasiana. 2016. *Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik untuk Pembangunan Berkelanjutan*. Diakses 5 April 2019. <https://www.kompasiana.com>
- Kumorotomo, Wahyudi. 2008. *Akuntabilitas Birokrasi Publik (Sketsa pada Masa Transisi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama
- Margono. 2005. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta : PT. Rineka Cipta

- Marmoah, Sri. 2016. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan Teori dan Praktek*. Yogyakarta: CV Budi Utama
- Melinda, Tina. 2003. *Penerapan Balanced Scorecard sebagai Sistem Pengukuran Kinerja*. Jurnal Media Mahardika. Vol. 1 No. 2. Januari: 29-33
- Miles, Matthew B., Michael Huberman dan Johnny Sandala. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Mohyi, Ach. 2012. *Teori dan Perilaku Organisasi*. Malang, Indonesia: UMMPress
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nasrul, Laode, dan Marsia. 2017. *Penggunaan Media dalam Menginformasikan Program Pembangunan pada Humas Sekretariat Daerah Kota Kendari*. Jurnal Ilmu Komunikasi Halu Oleo. Hal.:1-24
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik Cetakan Kesatu*. Bandung: Alfabeta
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
- Pustikom Kemenhub. 2018. *User Manual Aplikasi E-Planning Kementerian Perhubungan*. Jakarta: Kementerian Perhubungan
- Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Rochaety, Eti, Faizal Ridwan dan Tupi Setyowati. 2013. *Sistem Informasi Manajemen Edisi 2*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media
- Samsudin, Muhammad, Kusuma, Ratna Aji dan Djaya, Suarta. 2014. *Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial di Bagian Sosial Sekretariat Sosial di Kabupaten Kutai Timur*. Samarinda: E-Jurnal Administrative Reform. Vol. 2 No. 1. Hal.: 74-87
- Sari, Kusuma D.A. dan Winarno, W.A. 2012. *Implementasi E-Government System dalam Upaya Peningkatan Clean and Good Governance di Indonesia*. JEAM. Vol. XI No. 1. Hal: 1-19

- Sastradipoera, Komarudin. 2001. *Asas-Asas Manajemen Perkantoran: Suatu Pendekatan Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: Kappa-Sigma
- Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju
- Setiyadi, M.W.R. 2003. *E-Government sebagai Suatu Investasi: Mengukur Resiko Keuntungan dan Kegagalan Keberhasilan Implementasi E-Government di Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University
- Siswanto, H.B. 2006. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Steers, M. Richard. 2005. *Efektivitas Organisasi Kaidah Perilaku*. Jakarta: Erlangga
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta
- Sulistiarso, Son Ferri. 2014. *Peran Pelatihan dan Bimbingan Khusus untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada Sentra Pengrajin Gerabah di Desa Tondowulan, Kec. Plandaan, Kab. Jombang*. Skripsi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama
- Susanto, Azhar. 2004. *Sistem Informasi Manajemen: Konsep dan Pengembangannya*. Bandung: Lingga Jaya
- Tangkilisan, Nogi Hessel. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana
- Terry, R. George. 2000. *Pengembangan Sumber Daya Manusia: Pengaruhnya terhadap Kinerja dan Imbalan, Perilaku Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Widodo. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media

LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan untuk Pihak Kementerian Perhubungan

1. Aplikasi *e-planning* itu aplikasi yang seperti apa?
2. Bagaimana proses pelaksanaan *e-planning* ini? Seperti apa alurnya.
3. Kapan aplikasi *e-planning* ini diterapkan?
4. Apakah dasar hukum yang mendasari pelaksanaan aplikasi *e-planning*?
5. Apakah ada SOP pelaksanaan *e-planning*?
6. Apakah alasan pelaksanaan *e-planning* ini menjadi penting untuk dijalankan?
7. Bagaimana respon para pegawai dengan pelaksanaan *e-planning* ini? Apakah dapat diterima?

Ketepatan sasaran

8. Siapakah sasaran dari pelaksanaan aplikasi *e-planning*? (ditujukan kepada siapakah aplikasi *e-planning* tersebut)
9. Bagaimana keaktifan pegawai dalam melakukan pelaksanaan aplikasi *e-planning*?

Sosialisasi

10. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh petinggi Kemenhub terkait pelaksanaan aplikasi *e-planning*?
11. Apakah media yang digunakan untuk memberi informasi terkait pelaksanaan aplikasi *e-planning*?

Keberhasilan tujuan

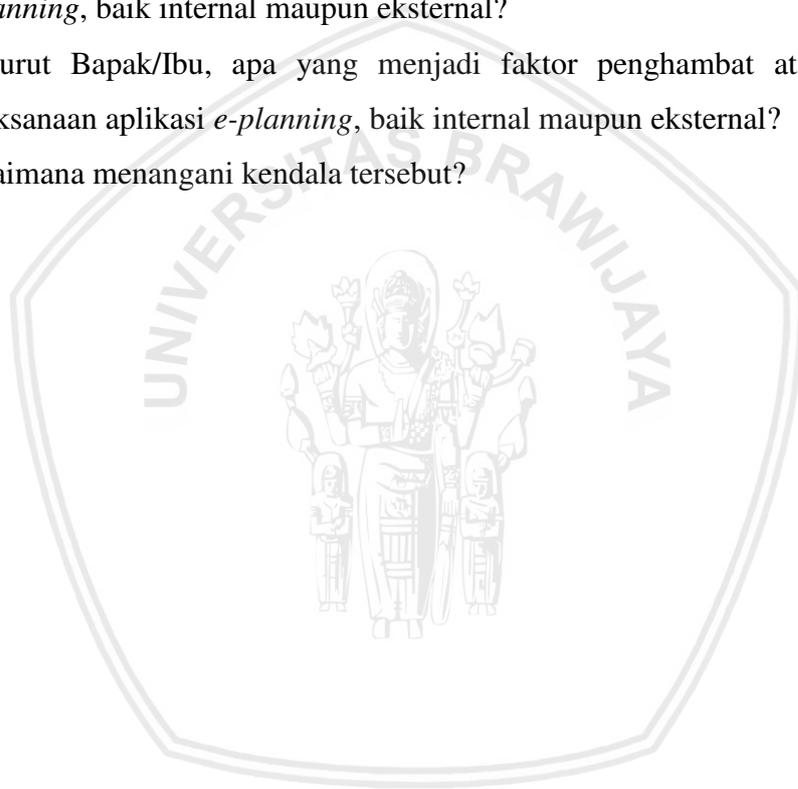
12. Apakah tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan aplikasi *e-planning*?
13. Bagaimana upaya untuk mencapai tujuan tersebut?
14. Bagaimana output yang dihasilkan melalui pelaksanaan upaya tersebut?

Pemantauan

15. Bagaimana pemantauan yang dilakukan dalam pelaksanaan aplikasi *e-planning*?
16. Apakah pelaksanaan aplikasi *e-planning* yang telah dilakukan sudah bisa dikatakan efektif?

Faktor pendukung dan penghambat

17. Menurut Bapak/Ibu, apa yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan aplikasi *e-planning*, baik internal maupun eksternal?
18. Menurut Bapak/Ibu, apa yang menjadi faktor penghambat atau kendala pelaksanaan aplikasi *e-planning*, baik internal maupun eksternal?
19. Bagaimana menangani kendala tersebut?



LAMPIRAN 2

SURAT IZIN PENELITIAN


KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
 Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
 Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
 http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 165.../UN10.F03.14/PN/2019
 Lampiran : -
 Hal : Riset

Kepada Yth. Kementerian Perhubungan
 Sekretariat Jenderal - Biro Perencanaan
 di Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat. Telp. (021) 3811308

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya memohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan melakukan riset bagi mahasiswa:

Nama : Ikhrisa Diana Khukmawati
 Alamat : Komp. Marinir Rumdis Kolam Renang No.23 RT 015/005
 Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560
 NIM : 155030100111041
 Jurusan : Administrasi Publik
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Judul : Efektivitas Pelaksanaan *E-Government* melalui Aplikasi *E-Planning* (Studi pada Kementerian Perhubungan)
 Lokasi : Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan
 Waktu : Februari 2019 s/d Mei 2019

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 4 Februari 2019
 a.n Dekan
 Ketua Jurusan Administrasi Publik


 Drs. Andy Fefia Wijaya, MDA, Ph.D.
 NIP. 19670217 199103 1 010

Formulir di buat rangkap 4 untuk :
 1. Instansi
 2. Mahasiswa
 3. Jurusan
 4. Arsip TU

LAMPIRAN 3

SURAT PENGANTAR SELESAI PENELITIAN


**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL**

JL. MERDEKA BARAT NO. 8 | TELP. : (021) 3811308, 3505006 | TLX : 46116 Menhub IA
JAKARTA 10110 | FAX : (021) 3522338 | email : pusdatin@dephub.go.id
SMS center : +62 813-111111-05 | home page : www.dephub.go.id

Nomor : *UM. 006/283/3 PHB 2019* Jakarta, *16* April 2019
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Surat Keterangan Pengantar Penelitian

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya

di
Malang

1. Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya nomor 1615/UN10.F03.11/PN/2019 perihal riset dan pengumpulan data, dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa Universitas Brawijaya yang namanya tersebut di bawah ini :

a. Nama : Ikhrisa Diana Khukmawati
NIM : 155030100111041
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

2. Telah selesai melaksanakan penelitian pada Bagian Program Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.

3. Demikian surat keterangan pengantar Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Kepala Biro Perencanaan
Gege Pasek Suardika
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19630717 198903 1 002

Utamakan Keselamatan Dalam Penyelenggaraan Transportasi

LAMPIRAN 4**DOKUMENTASI PENELITIAN**

Rapat di Hotel Merlynn Park bersama Bagian Rencana Biro Perencanaan perihal pengumpulan data studi



Ruang Rapat Biro Perencanaan perihal penyusunan naskah teknokratik Renstra Kementerian Perhubungan 2020-2024



Foto bersama Staff, Kepala Sub Bagian dan Kepala Bagian Program



Foto bersama Staff Direktorat Jenderal Hubungan Laut, Direktorat Jenderal Hubungan Udara, dan Direktorat Jenderal Hubungan Darat



Rapat Kerja Kementerian Perhubungan tentang RKA/KL Kementerian Perhubungan dalam nota keuangan RAPBN TA 2019



Wawancara peneliti bersama Ibu Dwi Utami selaku Kepala Sub Bagian Program Transportasi Laut



Wawancara peneliti bersama Bapak Bintang Anugrah Staff Sub Bagian Program Transportasi Laut



Wawancara peneliti bersama Bapak Dandun Prakosa selaku Kepala Bagian Program

LAMPIRAN 5**CURRICULUM VITAE****Data Pribadi**

Nama : Ikhrisa Diana Khukmawati
 Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 4 September 1996
 Agama : Islam
 E-mail : ikhrisadiana@yahoo.com
 Alamat Tinggal : Komp. Marinir Rumdis
 Kolam Renang No.23,
 Jakarta Selatan

Riwayat Pendidikan

1. SDN 01 Cilandak Timur Jakarta Selatan (2002-2008)
2. SMPN 96 Jakarta (2008-2011)
3. SMAN 49 Jakarta (2011-2014)
4. Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (2015-2019)

Pengalaman Organisasi

1. Staf Tari Tradisi Sanggar Seni Mahasiswa (2016)

Pengalaman Kepanitiaan

1. Sekretaris Pelaksana Kontingen FIA Gebyar Festival Tari UB (2016)
2. Staf Konsumsi Dekan Cup FIA UB (2016)
3. Staf Humas Olimpiade Brawijaya (2017)